



**DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN II TAHUN 2025



**Jl. Jenderal Sudirman 02, RT.04,
Kelurahan Melayu- Tenggara**



dp2kbkabkukar@gmail.com



<https://dp2kb.kukarkab.go.id>



Dppkb Kutai Kartanegara



dppkb_kutai_kartanegara



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 02 RT.04 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Email : dp2kbkukar@gmail.com, Website : <https://dp2kb.kukarkab.go.id>

Nomor	: B-102/Sekretariat/600.2.14.1/07/2025	Tenggarong, 14 Juli 2025
Sifat	: Biasa	Yth. Bupati Kutai Kartanegara
Lampiran	: -	Di-
Hal	: Laporan Pengelolaan Risiko Triwulan II Tahun 2025	Tenggarong

Dengan ini kami sampaikan Laporan Pengelolaan Risiko Triwulan II Tahun 2025 dengan dokumen terlampir.

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



DAFIP HARYANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP: 197009241990031001

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di Tempat
2. Asisten Bidang Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Selaku Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di Tempat
3. Inspektorat selaku Unit Pengawasan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di Tempat

Tanda terima

Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan :



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 02 RT.04 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Email : dp2kbkabkukar@gmail.com, Website : <https://dp2kb.kukarkab.go.id>

Nomor : B-102/Sekretariat/600.2.14.1/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Pengelolaan Risiko Triwulan II Tahun 2025

Tenggarong, 14 Juli 2025
Yth. Bupati Kutai Kartanegara
Di-
Tenggarong

Dengan ini kami sampaikan Laporan Pengelolaan Risiko Triwulan II Tahun 2025 dengan dokumen terlampir.

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

DAFIP HARYANTO, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP: 197009241990031001

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di Tempat
2. Asisten Bidang Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat selaku Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di Tempat
3. Inspektorat selaku Unit Pengawasan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di Tempat

Tanda terima

Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan :



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jenderal Sudirman No.02, RT.04 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Email : dp2kbkabbukar@gmail.com Website : <https://dp2kb.kukarkab.go.id>

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TRIWULAN II
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018 Pasal pada pasal 13 disebutkan pada ayat (1) “ Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas; a) identifikasi Risiko, dan analisis Risiko; (3) Dalam rangka Penilaian Risiko Sebagaimana pada ayat (1); Pimpinan Instansi Menetapkan: a) Tujuan Instansi pemerintah; b) Tujuan pada tiap tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan penilaian risiko dan telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko tahun 2025.

Hasil penilaian risiko dan RTP Risiko tersebut, disusun berdasarkan sasaran strategis dan operasional perangkat daerah sesuai dengan bisnis proses pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penilaian Risiko dilakukan dengan mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis, sasaran program dan kegiatan. Hasil identifikasi kemudian dianalisis dan ditentukan tingkat risikonya serta menentukan prioritas, perlakuan dan menyusun Rencana Tindak pengendalian Risiko (RTP) yang akan dilaksanakan, selanjutnya disusun Rencana

Tindak Pengendalian Risiko serta pemantauan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025.

Penilaian Risiko dan RTP Risiko yang telah disusun, selanjutnya akan menjadi panduan setiap Unit Pengelola Risiko (UPR) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan, sasaran strategis dan sasaran program dan kegiatan yang ingin dicapai. Hasil pelaksanaan Penilaian Risiko yang telah disusun, akan menjadi bagian terintegrasi dalam bisnis proses dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan setiap Keputusan strategis dan operasional terkait pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaporan Hasil Penilaian Risiko dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Bupati nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada pasal 22 ayat (1) “Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko”. Ayat (2) Laporan Pengelolaan Risiko pada ayat (1) meliputi a.Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko; b.Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan c.Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan. Dan hasil pelaksanaan penilaian Risiko tahun 2025 ini, disampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara, dan Kami harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan strategis dan operasional dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan pemerintah daerah.

1.2 Tujuan Pelaporan Pengelolaan Risiko:

Tujuan pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagai berikut:

1. Memberikan informasi hasil identifikasi Risiko, analisis Risiko dan hasil penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko, pada tujuan dan sasaran strategis, dan operasional pada program dan kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah tahun 2025.

2. Memberikan informasi tingkat Risiko dan Prioritas Penanganan Risiko Tahun 2025
3. Memberikan informasi tentang rencana pemantauan pelaksanaan RTP Risiko Tahun 2025.
4. Memberikan bahan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penanganan risiko strategis dan operasional lebih lanjut atas kejadian risiko sisa (*residual Risk*) yang memerlukan penanganan langsung oleh pimpinan pemerintah daerah.

1.3 Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 7):

5. Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2023 Tentang SOTK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 48):
6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko yaitu dilaksanakan pada Risiko strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis dan Risiko operasional sesuai dengan program dan kegiatan/sub kegiatan dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB II

PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

2..1 Konteks Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Konteks Manajemn Risiko mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu:

a. Visi dan Misi

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dirumuskan Visi sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia”

Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 Sebagai Berikut:

- 1) Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efesien Dan Melayani
- 2) Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya
- 3) Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- 4) Meningkatkan Kualitas Layanan Insfrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah
- 5) Miningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

b. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan, Indikator Tujuan dan target tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Tabel berikut:

Tabel
Indikator Tujuan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target 2025
01	Mewujudkan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang tumbuh seimbang ,berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan UsiaSubur (PUS)	Menurunnya Angka kelahirantotal (TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,14
			Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) cara modern	77,22
			Meningkatnya Angka Peserta KB Baru	15,20
			Menurunnya Angka unmetneed	10,50
			Meningkatnya Angka Akseptor MKJP	16,13
			Drop Out Akseptor Menurunnya Angka	12,02
		Meningkatnya peran stakeholder dalam program BANGGA KENCANA	Cakupan stakeholderyang terlibatdalam program BANGGA KENCANA	45,00
			Tersedianya dokumen grand design kependudukan	1,00
		Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga	Indek PembangunanKeluarga	63,00
			Cakupan anggota Bina Keluarga Balita(BKB) ber-KB	71,31
			Cakupan anggota BinaKeluarga Remaja(BKR) ber-KB	84,98
			Cakupan anggota BinaKeluarga Lansia (BKL)ber-KB	61,32

			Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	7,00
			Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	88,89
			Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	70,26
02	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Berkualitas dan melayani	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	62
			Tindak Lanjut temuan LHP BPK/ Inspektorat	100
			Persentase identifikasi, inventarisasi aset dalam penelusuran	100
			Persentase input Rencana Umum Pengadaan (RUP)	100
			Tingkat Kepatuhan LHKPN	100
			Tingkat Kepatuhan LHKSN	100
			Predikat tatakelola arsip	80,00

Sasaran Strategis, Indikator dan Target tahun 2025 sesuai Tabel berikut:

Tabel: Sasaran strategis Indikator Kinerja Utama dan Target

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,14
2.	Meningkatnya peran stakeholder dalam program BANGGA KENCANA	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA	45,00
3.	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga	Indek Pembangunan Keluarga	63,00
4.	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	62,00

c. Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tahun anggaran 2025 telah ditetapkan program, kegiatan/sub kegiatan dengan indikator hasil (*output*) sesuai Tabel berikut:

Tabel
Program, Kegiatan Indikator, Target dan Jumlah Anggaran

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target	Jumlah Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,55	10.902.788.436
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177 Dokumen	514.978.200,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	252.678.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	24.360.800,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	86.112.400,00
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	24.378.00,00
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah	1 Data	95.359.000,00
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	1 Berita Acara	32.090.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	12 Dokumen	7.534.534.567
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	55/Org/Bln	7.307.170.567,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.504.000,00

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulnan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	196.372.000,00
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	14.488.000,00
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	89.503.000,00
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	25.000.000,00
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan penatausahaan	4 Laporan	34.503.000,00
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang direkonsiliasi	2 Laporan	30.000.000,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	68 Orang	3.252.000,00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	10 Orang	3.252.000,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	42 Layanan	358.033.200,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	100.000.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang disediakan	4 Paket	60.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	19.999.800,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	1 Dokumen	9.630.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	30 Laporan	93.403.400,00
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip yang ditata	1 Dokumen	75.000.000,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan	30 Unit	112.582.000,00
			Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan	10 Unit	37.582.000,00

			Mesin Lainnya	mesin		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	75.000.000,00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.759.981.091,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	414.888.200,00
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.270.092.891,00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	95 Unit	529.924.378,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	11 Unit	382.022.800,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	84 Unit	97.901.578,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	45 Persen	5.762.192.440,00
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya dokumen Grand Design Kependudukan	1 Dokumen	176.997.180,00
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	365 Dokumen	41.790.000,00

			Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		
			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan	1 Kegiatan	43.256.100,00
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	55.445.400,00
			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program BANGGA KENCANA	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	80 Kegiatan	36.505.680,00
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	90 Persen	5.585.195.260,00
			Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	64.396.000,00
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	61.270.000,00
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	100.738.860,00
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	507.822.600,00
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	20 Dokumen	196.860.000,00
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program BANGGA KENCANA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program BANGGA KENCANA	237 Laporan	4.589.850.000,00
			Penyusunan Profil Program Pembangunan dan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA)	Jumlah Dokumen Profil Program Pembangunan dan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA)	1 Dokumen	64.257.800,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA	1). Menurunnya Angka Kelahiran Total	2,14 Angka	5.830.147.989,00

	BERENCANA (KB)		(TFR) per WUS (15-49 Tahun)	Absolut	
			2). Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Cara Modern (mCPR)	77,20 Persen	
			3). Meningkatnya Angka Peserta KB Baru	15,20 Persen	
			4). Menurunnya Angka Unmet Need	10,50 Persen	
			5). Meningkatnya Angka Akseptor MKJP	16,13 Persen	
			6). Menurunnya Angka Drop Out Akseptor	12,02 Persen	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE	5 Event	2.905.104.429,00
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	337.716.000,00
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	332.754.000 ,00
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6 Dokuman	134.022.129,00
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	21 Dokumen	1.866.427.800,00
		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2 Organisasi	234.184.500,00
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya kegiatan operasional KB di Lapangan	237 Desa	764.373.400,00
		Penyediaan Sarana	Jumlah Sarana Pendukung	12 Unit	10.912.000,00

			Pendukung Operasional PKB/PLKB	Operasional PKB/PLKB yang Tersedia		
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	237 Orang	651.750.000,00
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi	29.762.000,00
			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas KB/ Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	6 Laporan	71.949.400,00
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya alat, obat dan kontrasepsi pada Fasilitas Kesehatan	40 Faskes	1.237.129.760,00
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.689 Orang	938.054.000,00
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	3 Unit	65.218.000,00
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	72.188.000,00
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	6 Laporan	105.025.760,00
			Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	12 Kab/Kota	56.644.000,00
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Cakupan ORMAS / POKJA	75 Persen	923.540.400,00

		Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	9 Organisasi	56.007.000,00
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	100 Dokumen	58.478.800,00
		Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	2 Laporan	76.880.800,00
		Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunng (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	125 Unit	485.773.800,00
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	44 Kampung KB	246.400.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			1). Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	71,31%	5.100.113.800,00
			2). Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	84,98%	
			3). Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber- KB	61,32%	
			4). Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	7,00	
			5). Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	88,89%	
			6). Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri	70,26%	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	37,20 Persen	1.814.863.200,00
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan	2 Laporan	127.214.700,00

				Keuangan Keluarga)		
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	5 Laporan	726.750.000,00
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	295.701.100,00
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	120 Orang	153.667.400,00
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	76 Kelompok	355.656.100,00
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), BKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	30 Kelompok	155.873.900,00

		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupa ten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan peran ORMAS dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	80 Persen	3.285.250.600,00
		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Program Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Program Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	81.125.100,00
		PelaksanaanPeningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	68 Organisasi	117.211.600,00
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	3 Laporan	81.813.900,00
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin /kelahiran, Baduta /Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan	1.431.000.000,00
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin /kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan	1.574.100.000,00
		Jumlah			27.595.242.665,00

d. Struktur Pengelola Risiko Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pengelolaan Risiko pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diatur dalam SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, NOMOR: 21/DPPKB/SEK/100.1.2/1/2025, Tanggal 13 Januari 2025. Susunan Struktur Pengelola Unit Pemilik Risiko/Tim Manajemen Risiko sebagai berikut:

Susunan Personalia Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama/ NIP	Jabatan Organik Pada SKPD
1	Penanggungjawab	Dafip Haryanto,S.Sos.,M.Si NIP. 19700924 199003 1001	Kepala Badan/Dinas
2	Ketua	Dra. Mastukhah, M.Si NIP.19671112199203 2007	Sekretaris
3	Sekretaris merangkap Anggota Tim Kerja	Hennie Asfiyanie, SE.,M.Si NIP.196810131999032007	Perencana Ahli Muda
4	Anggota Tim Pelaksana	Haidir, SE.,MM NIP.197006102000121006	Penata KKB Ahli Muda
5	Anggota Tim Pelaksana	Dina Elvina, SE NIP.198008192006042028	Penelaah Teknis Kebijakan
6	Anggota Tim Pelaksana	Hj. Julianita, S.Kep NIP.198207022006042024	Penata KKB Ahli Muda
7	Anggota Tim Pelaksana	Denni Ibrahim, S.Sos NIP.197304072000121003	Penata KKB Ahli Muda
8	Assesor 1	Sri Lindawati, S.Sos.,M.Kes NIP.197112131991022001	Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
9	Assesor 2	Surya Admaja, SP NIP.197004021999121002	Kabid Pengendalian Penduduk
10	Assesor 3	Dra. Hj.Rina Luthfiana, MM NIP.196807211995032005	Kabid Keluarga Berencana
11	Assesor 4	Hj. Bertha Melania,SE.,M.Si NIP.197304061998032009	Kasubag Umum, Ketatalaksanaan dan

			Kepegawaian
12	Admin 1	Rina Era Anggraini,S.Sos.,M.Si NIP.198509022009012005	Pengolah Data dan Informasi
13	Admin 2	Rama Muzakar NIP. 197602022009021001	Pengolah Data dan Informasi

Tugas Unit Pemilik Risiko (UPR)/Tim Satgas Manajemen Risiko Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

- 1) Melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- 2) Melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
- 4) Menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
- 6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian Risiko.

2.2. Pengendalian Intern Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan Risiko Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah disusun Kriteria Efektivitas Pengendalian Intern pada Standar Operasional Prosedur untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Tabel
Kriteria Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Deskripsi	Kriteria		Keefektifan
	Desain	Operasional	
Kontrol bersifat preventif, dapat dioperasikan dan dilaksanakan secara konsisten. Perlu dipantau karena terpengaruh perubahan kondisi.	Ya	Ya	Efektif
Kontrol mencakup sebagian dari kebutuhan. Jika desain bagus operasional sebagian	Ya Tidak	Tidak Ya	Sebagian efektif
Baik desain maupun operasional dari kontrol yang ada tidak memadai. Perlu didesain ulang untuk perbaikan atau ganti baru.	Tidak	Tidak	Tidak efektif.

b. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri 3 komponen, yaitu skala kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko, skala dampak risiko, dan skala tingkat risiko (nilai risiko).

c. Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Tabel
Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 – 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31 – 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 5 Tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0

		- 10% atau 1 kali dalam 5 Tahun)
--	--	----------------------------------

d. **Skala Dampak Risiko**

Tabel
Skala Dampak Risiko

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian negara ≤ Rp1 Juta	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu Periode
Minor (2)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp1 Juta s.d Rp5 Juta	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu periode
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp5 Juta s.d Rp10 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu periode
Signifikan (4)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d Rp. 50 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu periode

Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp. 50 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja $\leq 25\%$	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode.
-----------------------	---	--	---------------------------------------	---------------------------------------	--

e. **Skala Penerimaan Nilai Risiko**

Tabel
Skala Nilai Penerimaan Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko (<i>Risk Appetite</i>)
1-2 (Sangat Rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16 (Sangat Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik
20-25 (Dahsyat)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik
Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko (<i>Risk Tolerance</i>)
1-5 (Sangat Rendah)	Dapat diterima
6-10 (Rendah)	Dapat diterima
11-15 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
16-20 (Sangat Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik
21-25 (Dahsyat)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik

f. **Kriteria Tingkat Risiko**

Gambar
Matriks Tingkat Risiko

Matriks Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5

	Dampak
--	--------

Pengelompokan Prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel
Pengelompokan prioritas Tingkat Risiko

Nilai Skala	Warna	Tingkat	Prioritas
1 -5	Hijau	Rendah	5
6 – 8	Hijau Muda	Rendah sedang	4
9 – 12	Kuning	Sedang tinggi	3
15 – 20	Jingga	Tinggi	2
20 - 25	Merah	Sangat Tinggi	1

- g. Kriteria Tingkat Risiko Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel
**Pemetaan Tingkat Risiko, selera Risiko, Toleransi Risiko dan Eskalasi
Tindakan**

Tingkat Risiko		Selera Risiko	Toleransi Risiko	Tindakan Eskalasi
Sangat Tinggi		Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian terutama tindakan responsif.	Risiko tidak dapat diterima dan ditoleransi dan perlakuan risiko perlu dikaji ulang untuk perbaikan atau penambahan perlakuan atau ganti yang baru.	Perlu perhatian Dewan Pengawas organisasi dan Pengendalian dapat dieskalasi kepemimpinan organisasi dan didukung dengan rencana penanganan terinci.
Tinggi		Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian baik preventif maupun responsif.		Perlu perhatian pimpinan organisasi, pengendalian eskalasi kepemimpinan manajemen senior organisasi dan didukung rencana rinci
Sedang tinggi		Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian terutama tindakan preventif.		Pengendalian dieskalasi ke manajer senior selaku pemilik risiko dan didukung dengan rencana rinci.
Sedang		Risiko tidak dapat	Risiko tidak dapat	Pengendalian cukup

rendah		diterima, namun perlakuan pengendalian hanya dilakukan jika manfaat yang diterima lebih besar dari biayanya	diterima tapi dapat ditoleransi sepanjang secara praktek menguntungkan.	dengan Manajer Bidang sesuai dengan kebijakan dan SOP yang berlaku.
Rendah		Risiko dapat diterima sehingga tidak perlu perlakuan, cukup kontrol yang ada, tapi perlu dimonitor oleh pemilik risiko.	Risiko dapat diterima dan ditoleransi sehingga tidak perlu perlakuan, cukup dengan kontrol yang ada dan dimonitor oleh pemilik risiko.	Pertahankan pengendalian yang ada dan monitor tingkat keterjadian risiko untuk perlakuan risiko.

BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO

1.1 Unit Pemilik Risiko Eselon II

3.1.1 Kepala Dinas

Nama Pejabat : Dafip Haryanto, S.Sos.,M.Si

NIP 197009241990031001

a. Sasaran strategis yang dikelola eselon II

Sasaran Strategis Eselon II sesuai Tabel berikut:

Tabel

Sasaran Strategis, Indikator, Target dan anggaran UPR Eselon II

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,14	5.830.147.989,00
	Meningkatnya peran stakeholder dalam program BANGGA KENCANA	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA	45,00	5.762.192.440,00
	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga	Indek Pembangunan Keluarga	63,00	5.100.113.800,00
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	62,00	10.902.788.436,00

b. Identifikasi Risiko Strategis

Hasil Identifikasi Risiko Strategis sesuai Tabel berikut:

Tabel

Hasil identifikasi Risiko Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya	UC/C	Tidak	Kegiatan dan sasaran	Internal/Eksternal	UC	4	Kepala Dinas,

	kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)		tercapainya program bangga kencana	advokasi belum optimal				Kepala Bidang
2	Meningkatnya peran stakeholder dalam program BANGGA KENCANA	UC/C	Tidak tercapainya program bangga kencana	Kurangnya informasi tentang Pogram BANGGA KENCANA pada Stakeholder yang terkait dan Ketersediaan Penyediaan dan Pengelolaan Data Kependudukan Tidak dapat digunakan dalam Data Dari Petugas Lapangan Belum Memadai dan Aplikasi Pelaporan belum dapat di pahami serta data Belum di entri keseluruhan.	Internal/Eksternal	UC	4	Kepala Dinas, Kepala Bidang
3	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga	UC/C	Tidak tercapainya program bangga kencana, Kualitas pembangun an keluarga tidak tercapai	Kapasitas Kompetensi Petugas lapangan terbatas untuk melaksanakan KIE, Belum Maksimalnya Tim Pendamping Keluarga dalam Mendampingi Sasaran Berisiko Stunting	Internal/Eksternal	UC	4	Kepala Dinas, Kepala Bidang
4	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja	UC/C	Laporan Transparansi Kinerja dan Keuangan tidak dapat memberikan keyakinan memadai	Laporan dan Data tidak disampaikan tepat waktu, Penganggaran yang tidak ada dalam SHBJ yang Terdapat dalam Aplikasi	Internal/Eksternal	C	4	Kepala Dinas, Sekretaris

c. Analisis Risiko Strategis

Hasil Analisis Risiko Strategis sesuai Tabel berikut:

Tabel
Hasil Analisis Risiko

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko				Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Perlakuan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian Tambahan	Analisis Risiko Setelah Pengendalian			Kategori/ Level risiko	Resiko Sisa
		K	D	Skor	Kategori/ Level risiko		Memadai/ Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif			K	D	Skor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
UC	Meningkatnya Angka Kelahiran, Tingginya angka stunting	4	4	20	Tinggi	SOP/Surat kepada Koordinator PKB / PLKB di masing - masing wilayah kecamatan agar memaksimalkan KIE dan meminta dukungan OPD terkait.	Memadai	Efektif	ada	Mengadakan pertemuan dengan PKB/PLKB	4	4	16	Rendah	Ada
UC	tidak optimalnya stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	4	4	20	Tinggi	SOP/Melaksanakan PKS bersama Stake holder yang terlibat dalam Program BANGGA KENCANA	Memadai	Efektif	ada	Mengadakan pertemuan dengan PKB/PLKB	4	4	16	Rendah	Ada
UC	Belum Tersedianya dokumen / data kependudukan	4	4	20	Tinggi	SOP, Monev	Memadai	Efektif	ada	Mengoptimalkan laporan petugas lapangan	4	4	16	Rendah	Ada
UC/C	Menurunnya kualitas keluarga yang mencakup ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga, tidak tercapainya program banggakencana	4	4	20	Tinggi	SOP/Surat kepada Koordinator PKB / PLKB di masing - masing wilayah kecamatan agar melaksanakan KIE lebih intensif.	Memadai	Efektif	ada	Mengadakan pertemuan dengan petugas di lapangan	4	4	16	Rendah	Ada
C	Laporan Kinerja dan Keuangan tidak dapat memberikan keyakinan memadai	4	4	20	Tinggi	Surat kepada Bidang - bidang untuk dapat menyajikan data capaian kinerja	Memadai	Efektif	Tidak	Melakukan Koordinasi dengan BPKAD	4	4	16	Rendah	Ada
C	Laporan Transparansi Kinerja dan Keuangan tidak dapat	4	4	20	Tinggi	Surat kepada Bidang - bidang untuk dapat menyajikan data	Memadai	Efektif	Tidak	Melakukan Koordinasi dengan BPKAD	4	4	16	Rendah	Ada

	memberikan keyakinan memadai					akuntabilitas kinerja								
--	------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

e. Pemetaan Penanganan Risiko Strategis

Gambar
Matriks Pemetaan Penanganan Risiko Strategis

Matriks Peta Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5

Keterangan: A = (Kode Risiko) sebelum penanganan
A1 = (Kode Risiko) setelah penanganan Risiko

f. Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan Eselon II sebagai berikut:

Tabel
Hasil Evaluasi Risiko Strategis

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UC	Meningkatnya Angka Kelahiran, Tingginya angka stunting	20	Tinggi	2
UC	tidak optimalnya stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	20	Tinggi	2
UC	Belum Tersedianya dokumen / data kependudukan	20	Tinggi	2
UC/C	Menurunnya kualitas keluarga yang mencakup ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga, tidak tercapainya program banggakencana	20	Tinggi	2
C	Laporan Kinerja dan Keuangan tidak dapat memberikan keyakinan memadai	20	Tinggi	2
C	Laporan Transparansi Kinerja dan Keuangan tidak dapat memberikan keyakinan memadai	20	Tinggi	2

g. Perlakuan dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko

Perlakukan (respon) dan rencana tindak pengendalian risiko strategis eselon

II sesuai Tabel berikut:

Tabel
Rencana Tindak Pengendalian Risiko Strategis

Kode Risiko	Risiko	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UC/C	Masih tingginya unmet need, tingginya DO dan rendahnya MKJIP dan rendahnya peserta KB Baru	Mitigasi	Peningkatan akses dan kualitas layanan KB, serta Edukasi dan komunikasi yang lebih efektif melalui KIE	12 Bulan	Kepala Dinas/Kabid
UC	tidak optimalnya stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA disebabkan oleh Belum maksimalnya Pemahaman OPD, terkait Stakeholder dan penggiat Program Bangga Kencana	Mitigasi	Meningkatkan pemahaman OPD terkait dengan menjalin Perjanjian Kerjasama	12 Bulan	Kepala Dinas/Kabid
UC	tidak tercapainya IPK yang berkaitan dengan peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Mitigasi	Meningkatkan peran kampung KB (Kampung Berkualitas) melalui KIE	1 Bulan	Kepala Dinas/Kabid
UC	Kurangnya Bukti Dukung dan lemahnya nitigasi permasalahan dari program kegiatan	Mitigasi	Membuat Surat Edaran agar Bidang-bidang menyampaikan laporan dan data yang diperlukan	12 Bulan	Kepala Dinas/Sekretaris

h. Pemantauan Risiko

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak Pengendalian Risiko Strategis sesuai Tabel berikut:

Tabel
Pemantauan RTP Risiko Strategis eselon II

Kode Risiko	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(5)	(16)
	Surat Kepala Dinas kepada PKB/PLKB agar mengawasi Pelaporan di aplikasi SIGA dan mengintensifkan KIE Membuat kertas kerja pelayanan serentak di 18 Kecamatan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kepala Bidang	Kepala Dinas
	Monitoring Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kepala Bidang	Kepala Dinas
	Menyusun SOP	x	x									x	x	Kepala Bidang	Kepala Dinas
	Menginstruksikan kepada PKB/PLKB agar Membuat kertas kerja pelayanan serentak di 20 Kecamatan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kepala Bidang	Kepala Dinas
	Mengadakan Rapat-rapat Evaluasi Kegiatan dan Capaian Kinerja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kepala Bidang	Kepala Dinas

Keterangan : (Warna Hijau rencana pelaksanaan)
(Warna Kuning Realisasi pelaksanaan)

3.2. Unit Pengelola Risiko (UPR) Eselon III

3.2.1 Sekretaris/Kepala Bidang

Nama Pejabat : Dra. Mastukhah, M.Si

NIP 19671112 199203 2 007

a. Program dan Kegiatan Yang Dikelola sesuai Tabel berikut :

Tabel

Sasaran Strategis, Indikator, Target dan Anggaran

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp.	Realisai	
					Fisik	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	85,40	10.902.788.436		4.519.821.058 41,46%
1.1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177 Dokumen	514.978.200	27%	76.494.260 14,85%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	252.678.000	1 Dokumen 20%	72.054.260 28,52%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	24.360.800	0 Laporan 0%	0 0%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	86.112.400	0 Laporan 0%	0 0%
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	95.359.000	0 Laporan 0%	0 0%
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	32.090.000	1 Berita Acara 100%	4.440.000 13,84%
	Penyelenggaraan Walidata	Jumlah Dokumen Hasil	1	24.378.000	0 Laporan	0

	Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		0%	0%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 Laporan	7.534.534.567	283 Org/bln 514,55%	4.005.154.971 53,16%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	770 Orang/bulan	8.185.425.215	283 Org/bln 514,55%	3.946.794.971 54,01%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.504.000	0 Laporan 0%	0 0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	196.372.000	1 Laporan 8,33%	58.360.000 29,72%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	14.488.000	0 Dokumen 0%	0 0%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	89.503.000	0 Dokumen 0%	20.700.000 23,13%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen 0%	0 0%
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan penatausahaan	4 Laporan	34.503.000	0 Laporan 0%	0 0%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan 50%	20.700.000 69,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	10 Orang	3.252.000	0 Orang 0%	0 0%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 Orang	3.252.000	0 Orang 0%	0 0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	42 Layanan	358.033.200	1 Paket 25%	29.595.000 8,7%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.000.000	0 Paket 0%	0 0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	60.000.000	1 Paket 25%	12.210.000 20,35%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19.999.800	0 Paket 0%	0 0%
	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan	1	9.630.000	0	0

	dan Peraturan Perundang-undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen 0%	0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	93.403.400	11 Laporan 36,67%	17.385.000 18,61%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	75.000.000	0 Dokumen 0%	0 0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	30 Unit	112.582.000	0 Unit 0%	0 0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	37.582.000	0 Unit 0%	0 0%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	75.000.000	0 Unit 0%	0 0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.834.920.508	12 Laporan 50%	386.692.377 21,97%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	414.888.200	6 Laporan 50%	107.553.361 25,92%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	75.000.000	0 Laporan 0%	0 0%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.270.092.891	6 Laporan 50%	279.139.016 21,98%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	171 Unit	529.924.378	4 Unit 4,76%	1.184.450 0,22%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	382.022.800	0 Unit 0%	0 0%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84 Unit	97.901.578	4 Unit 4,76%	1.184.450 1,21%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	0 Unit 0%	0 0%

3.2. Unit Pengelola Risiko (UPR) Eselon III

3.2.2 Kepala Bidang Keluarga Berencana

Nama Pejabat : **Dra. Rina Luthfiana, MM**

NIP 19680721 199503 2 005

b. Program dan kegiatan yang dikelola sesuai Tabel berikut:

Tabel 19

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp.	Capaian	
					Fisik	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
I	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	MENURUNNYA ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR) PER WUS (15-49 TAHUN)	2,14	5.830.147.989	14%	385.490.960 6,61%
1.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE	5 Event	2.905.104.429	4,76%	45.855.960 1,58%
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	337.716.000	0 Laporan 0%	0 0%
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	20 Laporan	332.754.000	0 Laporan 0%	0 0%
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6 Dokumen	134.022.129	0 Dokumen 0%	0 0%
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	21 Dokumen	1.866.427.800	1 Dokumen 4,76%	41.045.960 2,20%

	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2 Organisasi	234.184.500	0 Organisasi 0%	4.810.000 2,05%
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya kegiatan operasional KB di Lapangan	237 Desa	764.373.400		90.750.000 11,87%
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	12 Unit	10.912.000	0 Unit 0%	0 0%
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	237 Orang	651.750.000	45 Orang 18,99%	90.750.000 11,87%
	Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi Yang Terlibat Dalam Kegiatan Pembinaan Kader IMP	1 Organisasi	29.762.000	0 Organisasi 0%	0 0%
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petug	6 Laporan	71.949.400	0 Laporan 0%	0 0%
1.2	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya alat, obat dan kontasepsi pada Fasilitas Kesehatan	40 Faskes	1.237.129.760	12,83%	248.885.000 20,12%
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.689 Orang	938.054.000	345 Orang 12,83%	235.285.000 25,07%
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan	3 Unit	65.218.000	0 Unit 0%	0 0%
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	72.188.000	0 Laporan 0%	0 0%
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	6 Laporan	105.025.760	0 Laporan 0%	13.700.000 13,04%
	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	12 Kab/Kota	56.644.000	0 Kab/Kota 0%	0 0%
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan ORMAS/POKJA	75 Persen	923.540.400		0 0%

	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	9 Organisasi	56.007.000	0 Organisasi 0%	0 0%
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	100 Dokumen	58.478.800	0 Dokumen 0%	0 0%
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	2 Laporan	76.880.800	0 Laporan 0%	0 0%
	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	125 Unit	485.773.800	0 Unit 0%	0 0%
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	44 Kampung	246.400.000	0 Kampung 0%	0 0%

3.2. Unit Pengelola Risiko (UPR) Eselon III

3.2.3 Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Nama Pejabat : **Sri Lindawati, S.Sos, M.Kes**

NIP : 19711213 199102 2 001

b. Program dan kegiatan yang dikelola sesuai Tabel berikut:

Tabel :

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp.	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Fisik	Anggaran
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA	63,00	5.100.113.800		567.254.400 11,12%
1.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	36 Persen	1.814.863.200		57.814.400 3,19%
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	8 Laporan	726.750.000	0 Laporan 0%	38.500.000 5,30%
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok	Jumlah Laporan Hasil Promosi	2 Laporan	127.214.700	1	0

	Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			Laporan 20%	0,0%
1.1.1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	15 Unit	295.701.100	0 Unit 0%	15.744.400 5,32%
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	120 Orang	153.667.400	0 Orang 0%	0 0%
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	76 Kelompok	355.656.100	15 Kelom- pok 19,74 %	3.570.000 1%
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	30 Kelompok	155.873.900	0 Kelom- pok 0%	0 0%
1.2	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya dan Terpenuhinya Peran Serta ORMAS dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	60 Persen	3.285.250.600		509.440.000 15,51%
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan	1 Laporan	81.125.100	0 Lapo- ra n 0%	2.920.000 3,60%

	Keluarga/UPPKS)	Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	68 Organisasi	117.211.600	0 Organisasi 0%	0 0%
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	3 Laporan	81.813.900	0 Laporan 0%	0 0%
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	65 Persen	1.431.000.000	0 Laporan 0%	241.200.000 16,86%
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	Jumlah Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 Laporan	1.574.100.000	0 Laporan 0%	265.320.000 16,86%

3.2. Unit Pengelola Risiko (UPR) Eselon III

3.2.4 Kepala Bidang Pendataan dan Pengendalian Penduduk

Nama Pejabat : **Surya Admaja, SP**

NIP 19700402 199912 1 002

d. Program dan kegiatan yang dikelola sesuai Tabel berikut:

Tabel 19
Sasaran Strategis, Indikator, Target dan Anggaran

No .	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp.	Realisasi	
					Fisik	Anggaran
I	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	CAKUPAN STAKHOLDER YANG TERLIBAT DALAM PROGRAM KKBPK	45 Persen	5.762.192.440,00		131.471.360 2,28%
1.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya dokumen grand design kependudukan	1 Dokumen	176.997.180,00		2.920.000 1,65%

	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	365 Dokumen	41.790.000,00	0 Dokumen 0%	1.460.000 3,49%
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan	1 Dokumen	43.256.100,00	0 Dokumen 0%	1.460.000 3,38%
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	55.445.400,00	0 Dokumen 0%	0 0%
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program BANGGA KENCANA	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	18 Dokumen	36.505.680,00	0 Dokumen 0%	0 0%
1.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Di Kabupaten Kutai Kartanegara	75 Persen	5.585.195.260,00		128.551.360 2,30%
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	64.396.000,00	0 Dokumen 0%	0 0%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	1 Laporan	61.270.000,00	0,5 Laporan 50%	19.060.000 31,11%
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	1 Laporan	100.738.860,00	0 Dokumen 0%	2.319.600 2,30%
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	20 Dokumen	507.822.600,00	0 Laporan 0%	44.833.000 8,73%
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan Dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	43 Dokumen	196.860.000,00	1 Dokumen 5%	47.833.000 24,30%
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program BANGGA KENCANA	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	237 Laporan	4.589.850.000,00	0,01 Laporan 0%	15.008.760 0,33%
	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA)	Jumlah Dokumen Profil Program Pembangunan dan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA)	1 Dokumen	64.257.800,00	0 Dokumen 0%	0 0%

e. Hasil Identifikasi Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel
Hasil identifikasi Risiko Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	PROGRAM URUSAN DAERAH PENUNJANG PEMERINTAH	C	Kurangnya Bukti Dukung dan Dokumen pengukuran kinerja tidak sesuai	Perangkat Daerah tidak mendokumen tasikan kegiatan-kegiatannya menjadi tolak ukur penilaian SAKIP	Internal	C	Predikat penilaian SAKIP DPPKB rendah	Kepala Dinas
1.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH							
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	C	Penyusunan dokumen perencanaan daerah di OPD tidak dapat di laksanakan dengan baik	Kurang tersedianya data dukung dalam pelaksanaan perencanaan	Internal	C	Kebijakan Daerah tidak bisa di akomodir oleh OPD	Kepala Dinas, Sekretaris
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	C	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD belum memberikan informasi yang baik dan memadai	Kurang kordinasi dan belum tersedianya data yang akurat Sekretariat dan Bidang	Internal	C	Data tersebut tidak dapat di gunakan untuk pelaporan perangkat daerah	Kepala Dinas, Sekretaris
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	C	Dokumen Laporan Kinerja belum dapat di evaluasi oleh atasan Langsung atas evaluasi kinerja karena kegiatan belum berjalan	ASN dan Pejabat Struktural belum menyusun laporan kinerja	Internal	C	Capaian Kinerja ASN dan Pejabat Struktural di lingkungan Dinas tidak terukur.	Kepala Dinas, Sekretaris
4	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	C	Belum bisa menyajikan data yang akurat dan memadai	Kurang kordinasi dan belum tersedianya	Internal	C	Data tersebut tidak dapat di gunakan untuk pelaporan	Kepala Dinas, Sekretaris

				data yang akurat Sekretariat dan Bidang			perangkat daerah	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	C	Belum bisa menyajikan data yang akurat dan memadai	Kurang kordinasi dan belum tersedianya data yang akurat Sekretariat dan Bidang	Internal	C	Data tersebut tidak dapat di gunakan untuk pelaporan perangkat daerah	Kepala Dinas, Sekretaris
5	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	C	Belum tersedianya data dukung penyusunan dokumen perencanaan	Data Kinerja Sekretariat dan Bidang tidak Valid	Internal/eksternal	C	Pelaksanaan Kurang maksimal	Kepala Dinas, Sekretaris
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	C	Gaji dan Tunjangan ASN tidak dapat diberikan tepat waktu	daftar gaji ASN terlambat di Verifikasi	Internal	C	ASN tidak mendapatkan haknya tepat waktu tiap bulan	Kepala Dinas, Sekretaris
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	C	Laporan Capaian Realisasi Kegiatan SKPD Tidak Maksimal	Laporan Capaian Realisasi Kegiatan SKPD Tidak Maksimal	Internal	C	Tidak tercapainya Target kinerja oleh Laporan Keuangan	Kepala Dinas, Sekretaris
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	C	Laporan Terlambat Dikumpulkan	Laporan Terlambat Dikumpulkan	Internal	C	Pemerintah Daerah Kesulitan Konsolidasi Laporan Keuangan	Kepala Dinas, Sekretaris
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	C	Salah Penyajian Pelaporan	Salah Penyajian Pelaporan	Internal	C	Tidak tercapainya Target kinerja oleh Laporan Keuangan	Kepala Dinas, Sekretaris
1.3.1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
10	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	C	Data Barang Baru hasil pengadaan belum tercatat di KIB terkait	Data Barang Baru hasil pengadaan belum tercatat di KIB terkait	Internal	C	Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah tidak tersaji dengan Baik	Kepala Dinas, Sekretaris
11	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	C	Banyaknya Barang yang di serahkan semua Kecamatan	Banyaknya Barang yang di serahkan semua Kecamatan	Internal	C	Laporan Pemerintah Daerah terlambat diserahkan pada pengawas External	Kepala Dinas, Sekretaris
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	c	Kurang akuratnya data yang diperoleh	BMD yang diserahkan kepada	Internal	c	Terjadi selisih pencatatan	Kepala Dinas, Sekretaris

				pegawai belum terdata dengan baik				
1.4.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	C	Kapasitas ASN masih rendah dalam penerapan IT dan Penjabaran Kebijakan	Kapasitas ASN masih rendah dalam penerapan IT dan Penjabaran Kebijakan	Internal	C	Kurangnya Tingkat Kedispilna dan Kinerja ASN	Kepala Dinas, Sekretaris
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	C	Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Internal, ekstral	C	Pemakai Barang Tidak dapat Melaksanakan Fungsi pekerjaannya	Kepala Dinas, Sekretaris
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	C	Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Internal	C	Pemakai Barang Tidak dapat Melaksanakan Fungsi pekerjaannya	Kepala Dinas, Sekretaris
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	C	Barang Cetak Tidak Sesuai Kebutuhan	Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Internal	C	hasil penggandaan kurang bagus	Kepala Dinas, Sekretaris
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	C	Bahan Bacaan belum dapat memenuhi kebutuhan akan referensi	Bahan Bacaan belum update	Internal	C	Hasil Peraturan kurang update	Kepala Dinas, Sekretaris
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	C	Asn yang ditugaskan tidak memiliki kapasitas dan kompetensi	Asn yang ditugaskan tidak memiliki kapasitas dan kompetensi	Internal	C	Keputusan rapat koordinasi dan konsultasi tidak dapat digunakan untuk kebijakan pimpinan	Kepala Dinas, Sekretaris
19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	C	Klasifikasi dan kodefikasi arsip belum diterapkan	Klasifikasi dan kodefikasi arsip belum diterapkan	Internal	C	Arsip Dinamis sulit ditemukan	Kepala Dinas, Sekretaris
1.7.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	C	Barang hasil Pengadaan tidak mencukupi Terlambat Diterima	Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Internal	C	Pemakai Barang Tidak dapat Melaksanakan Fungsi pekerjaannya	Kepala Dinas, Sekretaris
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	C	Barang hasil Pengadaan Terlambat	Barang hasil Pengadaan Terlambat	Internal	C	Pemakai Bangunan Tidak dapat merasakan	Kepala Dinas, Sekretaris

			Diterima dan tidak mencukupi	Diterima			rasa aman	
1.7.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	C						
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	C	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak dapat tepat waktu	Pemutusan pemakaian oleh pihak yang berkompeten	Internal	C	Terganggunya Operasional pelayanan Kantor	Kepala Dinas, Sekretaris
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	C	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor belum dapat memberikan kelancaran pelaksanaan tugas	Peralatan dan Perlengkapan Kantor masih banyak yang rusak	Internal	C	Tugas pokok dan fungsi ASN terganggu	Kepala Dinas, Sekretaris
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	C	Gaji Non ASN tidak dapat memberikan kesejahteraan kepada Non ASN	daftar gaji Non ASN terlambat di usulkan dan di Verifikasi	Internal	C	Non ASN tidak mendapatkan haknya tepat waktu tiap bulan	Kepala Dinas, Sekretaris
1.8.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	C						
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	C	Pengenaan denda pembayaran oleh pihak yang berkompeten	Kendaraan Dinas masih banyak yang rusak	Internal	C	Tugas pokok dan fungsi ASN terganggu	Kepala Dinas, Sekretaris
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	C	Anggaran tidak mencukupi untuk pemeliharaan kendaraan dan pembayaran pajak.	Kendaraan Dinas Operasional atau langan Kantor masih banyak yang rusak	Internal	C	Tugas pokok dan fungsi DPPKB terganggu	Kepala Dinas, Sekretaris
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	C	Anggaran tidak mencukupi untuk melaksanakan rehab	Barang hasil Pengadaan Terlambat dikerjakan	Internal	C	Pemakai Bangunan Tidak dapat merasakan rasa aman	Kepala Dinas, Sekretaris
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	C	Masih tingginya unmet need, tingginya DO dan rendahnya MKJIP dan rendahnya peserta KB Baru	Masalah Geografis sehingga tidak terlayani, kurangnya pemahaman terhadap alat kontrasepsi, kurangnya minat ber-KB	Internal/eksternal	C	Tidak tercapainya target pengendalian angka kelahiran (TFR0 per WUS (15-49 Tahun)	Pemkab, Kadis
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	C						

28	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	C	Keterlambatan pembayaran belanja operasional Balai	Terkena denda		C	Pemutusan Fasilitas di balai penyuluhan	Kepala Dinas/Kepala Bidang
29	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	C	Keterlibatan partisipasi petugas lapangan dalam Rakorcam, Rakordes dan Minlok belum optimal	koordinasi petugas dg stakeholder lintas sektor masih rendah	Eksternal		pelaksanaan operasional sarana dan prasarana menjadi terhambat	Kepala Dinas/Kepala Bidang
30	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	C	Jangkauan Promosi dan informasi Program KKBPK belum maksimal	frekuensi, Intensitas dan jangkauan Informasi masih terbatas	Eksternal	C	Kader Tidak dapat Melaksanakan Kebijakan Daerah Program Bangsa Kencana Khususnya Program BANGGA KENCANA	Kepala Dinas/Kepala Bidang
31	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	C	Capaian sasaran program KKBPK KIE Budaya Lokal masih rendah	Model metode KIE masih terbatas kurang tepat sasaran	Eksternal	C	Kader Tidak dapat Melaksanakan Kebijakan Daerah Program Bangsa Kencana Khususnya Program BANGGA KENCANA	Kepala Dinas/Kepala Bidang
32	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	C	Regulasi pendukung program KKBPK masih terbatas	kegiatan dan sasaran advokasi belm optimal	Eksternal	C	Kader Tidak dapat Melaksanakan Kebijakan Daerah Program Bangsa Kencana Khususnya Program BANGGA KENCANA	Kepala Dinas/Kepala Bidang
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	C						Kepala Dinas/Kepala Bidang
33	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	C	Belum optimalnya Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Pelayanan kepada calon akseptor kurang maksimal	Eksternal/Internal	C	pelaksanaan operasional sarana dan prasarana menjadi terhambat	Kepala Dinas/Kepala Bidang
34	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	C	Capaian program dan Kinerja Kader belum optimal	Kapasitas Kompetensi Pembinaan terbatas	Eksternal/Internal		Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tidak Dapat Maksimal Melaksanakan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kepala Dinas/Kepala Bidang
35	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB	C	Kinerja Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader PPKBD/Sub	Kapasitas Kompetensi Petugas lapangan terbatas	Eksternal/Internal	C	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tidak Dapat Maksimal	Kepala Dinas/Kepala Bidang

			PPKBD belum optimal				Melaksanakan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
36	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	C	Keterlambatan dan ketersediaan di Fasilitas Kesehatan belum mencukupi	Distribusi Alokasi dari Propinsi tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan kebutuhan	Eksternal/Internal	C	Kader Tidak dapat Melaksanakan Kebijakan Daerah Program Bangga Kencana Khususnya Program BANGGA KENCANA	Kepala Dinas/Kepala Bidang
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	C						Kepala Dinas/Kepala Bidang
37	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	C	Pelayanan KB kepada Masyarakat belum maksimal	Kinerja Kader PPKBD/Sub PPKBD dalam penggerakan kesertaan KB MKJP belum optimal	Eksternal/Internal	C	capaian program masih rendah	Kepala Dinas/Kepala Bidang
38	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	C	Sarana / Prasarana tidak sesuai dengan Spesifikasi yang distandarkan	kurang pengawasan intensif dari pihak penanggungjawab	Eksternal/Internal		Akses bagi Pengguna Sarana dan Prasarana kurang optimal	Kepala Dinas/Kepala Bidang
39	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	C	Pelayanan KB kepada Masyarakat belum maksimal	Kinerja Kader PPKBD/Sub PPKBD dalam penggerakan kesertaan KB MKJP belum optimal	Eksternal/Internal	C	capaian PB MKJP rendah	Kepala Dinas/Kepala Bidang
40	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	C	Pengadaan Sarana dan Prasarana Tidak dapat menunjang kelancaran operasional	Pihak Penyedia Tidak Berpengalaman	Eksternal/Internal	C	Capaian Program masih rendah	Kepala Dinas/Kepala Bidang
41	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	C	Peran dan Partisipasi Ormas dan Mitra Kerja belum optimal	Koordinasi dan Sosialisasi kurang	Eksternal/Internal	C	Capaian Program masih rendah	Kepala Dinas/Kepala Bidang
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	C						Kepala Dinas/Kepala Bidang
42	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan	C	Peran dan Partisipasi Ormas	Koordinasi dan Sosialisasi	Eksternal/Internal	C	Capaian Program rendah, Kampung	Kepala Dinas/Kepala Bidang

	Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		dan Mitra Kerja belum optimal	kurang			KB Vacuum	Bidang
43	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	C	Peran dan Partisipasi Ormas dan Mitra Kerja di Kampung KB masih rendah	keterbatasan Pengetahuan dan Ketrampilan Ormas dan Mitra kerja	Eksternal/Internal		Capaian Program rendah, Kampung KB Vacuum	Kepala Dinas/Kepala Bidang
44	Pembinaan Terpadu Kampung KB	C	Kinerja Pokja dan Poktan Kampung KB belum optimal	keterbatasan Pengetahuan dan Pokja dan Poktan	Eksternal/Internal	C	Capaian Program rendah, Kampung KB Vacuum	Kepala Dinas/Kepala Bidang
45	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	C	Kemampuan Kader belum dapat meningkatkan Program ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	Narasumber menyampaikan materi yang tidak sesuai dengan Peningkatan Pengetahuan Kader	Eksternal/Internal	C	Capaian Program rendah, Kampung KB Vacuum	Kepala Dinas/Kepala Bidang
46	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	C	Regulasi pendukung program KKBPB masih terbatas	kegiatan dan sasaran advokasi belum optimal	Eksternal/Internal	C	Capaian Program rendah, Kampung KB Vacuum	Kepala Dinas/Kepala Bidang
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	C	Tidak tercapainya indeks Pembangunan Keluarga	KIE kurang optimal, pembinaan di kampung KB tidak berjalan	Eksternal/Internal	UC	Capaian Program kebahagiaan, ketentraman rendah	Kepala Dinas/Kepala Bidang
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	C						Kepala Dinas/Kepala Bidang
47	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	C	Kinerja Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader PPKBD/Sub PPKBD belum optimal	Kapasitas Kompetensi Petugas lapangan terbatas	Eksternal/Internal	C	Kader Tidak dapat Melaksanakan Kebijakan Daerah Program Bangga Kencana Khususnya Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kepala Dinas/Kepala Bidang
48	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	C	Kinerja Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader PPKBD/Sub PPKBD belum optimal	Kapasitas Kompetensi Petugas lapangan terbatas	Eksternal/Internal	c	Kader Tidak dapat Melaksanakan Kebijakan Daerah Program Bangga Kencana Khususnya Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kepala Dinas/Kepala Bidang
49	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	C	Sarana / Prasarana tidak sesuai dengan Spesifikasi yang	kurang pengawasan intensif dari	Eksternal/Internal	C	pelaksanaan operasional sarana dan prasarana	Kepala Dinas/Kepala Bidang

	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		distandarkan	pihak penanggungjawab			menjadi terhambat	
50	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	C	Kemampuan Kader belum dapat meningkatkan Program ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	Narasumber menyampaikan materi yang tidak sesuai dengan Peningkatan Pengetahuan Kader	Eksternal/Internal	C	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tidak Dapat Maksimal Melaksanakan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kepala Dinas/Kepala Bidang
51	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	C	Tidak terakomodirnya semua kelompok kegiatan yang mendapatkan biaya operasional, sehingga banyak kelompok yang berjalan hanya seadanya dan tidak maksimal menjalankan program	Belum Maksimalnya ketersediaan anggaran operasional yang sangat diperlukan oleh kader kelompok kegiatan	Eksternal/Internal	C	pelaksanaan operasional sarana dan prasarana menjadi terhambat	Kepala Dinas/Kepala Bidang
52	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	C	Kemampuan Kader Kelompok Kegiatan belum dapat meningkatkan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Belum Maksimalnya Monitoring dan Evaluasi terhadap Kelompok Kegiatan	Eksternal/Internal	C	kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga tidak mendapatkan mengisi Blangko yang sesuai	Kepala Dinas/Kepala Bidang
	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	C						Kepala Dinas/Kepala Bidang
53	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	C	Rendahnya jumlah remaja yang tergabung dalam kelompok PIK R dan Forum Generasi Berencana(GenRe)	Kurangnya pengetahuan Remaja tentang pentingnya Program GenRe terutama dalam upaya pencegahan stunting sejak dini	Eksternal/Internal	C	Mitra dan organisasi kemasyarakatan tidak melaksanakan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kepala Dinas/Kepala Bidang

54	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	C	Mitra dan organisasi kemasyarakatan belum dapat meningkatkan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Narasumber menyampaikan materi yang tidak sesuai dengan peningkatan dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Eksternal/Internal	C	Mitra Kerja tidak dapat meningkatkan kesejahteraan dalam usahanya	Kepala Dinas/Kepala Bidang
55	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	C	Mitra Kerja belum dapat meningkatkan kemampuan nya dalam berusaha	Kurangnya Kesempatan Mitra Untuk memperkenalkan Program dari Bangsa kencana Melalui Usaha Ekonomi Kreatif	Eksternal/Internal	C	Mitra Kerja tidak dapat meningkatkan kesejahteraan dalam usahanya	Kepala Dinas/Kepala Bidang
56	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	C	Pencatatan dan Pelaporan Akseptor dalam SIGA oleh Nakes/PLKB/PKB belum Optimal	Petugas belum memahami prosedur input data pd Aplikasi	Eksternal/Internal	C		Kepala Dinas/Kepala Bidang
57	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	C	Kinerja Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader PPKBD/Sub PPKBD belum optimal	Kapasitas Kompetensi Petugas lapangan terbatas	Eksternal/Internal	C		Kepala Dinas/Kepala Bidang
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	C	Tidak Optimalnya Stakeholder yang terlibat dalam Program BANGGA KENCANA	Belum maksimalnya pemahaman OPD terkait Stake holder dan penggiat tentang program BANGGA KENCANA	Eksternal/Internal	UC	Pelaksanaan Program Kegiatan Tidak Tercapai	Kepala Dinas/Kepala Bidang
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	C						Kepala Dinas/Kepala Bidang
58	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur	C	Kurangnya referensi materi	Kapasitas pengembang	Eksternal/Internal	C	Data Tidak dapat dimanfaatkan dalam pengambilan	Kepala Dinas/Kepala Bidang

	Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai isu Lokal Kabupaten/Kota	an materi terbatas			keputusan oleh Pihak terkait	
59	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	C	Perjanjian Kerjasama tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya informasi dan koordinasi	Perjanjian Kerjasama tidak dapat dilaksanakan	Eksternal/Internal	C	Data Tidak dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Dinas	Kepala Dinas/Kepala Bidang
60	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	C	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan	Aplikasi Pelaporan belum dapat di pahami dan data Belum di entri keseluruhan.	Eksternal/Internal	C	Data Tidak dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Dinas	Kepala Dinas/Kepala Bidang
61	Pelaksanaan Pengendalian RAPAT PROGRAM BANGGA KENCANA	C	Hasil rapat tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan	Kurangnya koordinasi dan informasi	Eksternal/Internal	C	Data Tidak dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Dinas	Kepala Dinas/Kepala Bidang
	Pemetaan Pengendalian Cakupan Kabupaten/Kota Perkiraan Penduduk Daerah	C						Kepala Dinas/Kepala Bidang
62	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	C	Penyediaan dan Pengelolaan Data Kependudukan Tidak dapat digunakan dalam kebijakan daerah	Aplikasi Pelaporan belum dapat di pahami dan data Belum di entri keseluruhan.	Eksternal/Internal	C	Data Tidak dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Dinas	Kepala Dinas/Kepala Bidang
63	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	C	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga/SIGA dan Kegiatan BOKB tidak dapat dijalankan OPD	Pelaporan Kegiatan BOKB belum dikerjakan secara keseluruhan Melalui Aplikasi	Eksternal/Internal	C	Data Tidak dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Dinas	Kepala Dinas/Kepala Bidang
64	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	C	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia belum optimal	Aplikasi Pelaporan belum dapat di pahami dan data Belum di entri keseluruhan.	Eksternal/Internal	C	Data Tidak dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Dinas	Kepala Dinas/Kepala Bidang

65	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	C	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Belum optimal	Aplikasi Pelaporan belum dapat di pahami dan data Belum di entri keseluruhan.	Eksternal/Internal	C	Data Tidak dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Dinas	Kepala Dinas/Kepala Bidang
66	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	C	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan belum optimal	Aplikasi Pelaporan belum dapat di pahami dan data Belum di entri keseluruhan.	Eksternal/Internal	C	Data Tidak dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Dinas	Kepala Dinas/Kepala Bidang
67	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program BANGGA KENCANA	C	PKB/PLKB dan Kader Pendata Belum Mampu dalam Melakukan pengorganisasian lini lapangan	Data Keluarga Tidak Valid	Eksternal/Internal	C	Data Tidak dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Dinas	Kepala Dinas/Kepala Bidang
68	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA)	C	Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga belum memberikan informasi yang optimal	Data kependudukan yang diperoleh belum divalidasi .	Eksternal/Internal	C	Buku profil Kependudukan belum dapat diyakini keandalannya	Kepala Dinas/Kepala Bidang

f. Hasil Analisis Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut

Tabel
Hasil Analisis Risiko Program dan Kegiatan

Kode Risiko.	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko				Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Resiko Sisa/Residual Risk
		K	D	Skor	Kategori/Level risiko		Memadai/Tidak memadai	Efektif/Tidak Efektif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
C	Laporan yang tersaji tidak valid Dokumen pengukuran kinerja tidak sesuai disebabkan oleh Perangkat Daerah tidak mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian SAKIP	4	5	20	Tinggi	Pedoman Penyusunan SAKIP,SOP Penyusunan SAKIP	Memadai	Efektif	ada
UC/C	Data Evaluasi Kinerja Belum Valid dan dokumen Laporan Kinerja belum dapat dievaluasi oleh atasan langsung karena ASN dan Pejabat Struktural belum menyusun laporan kinerja	4	5	20	Tinggi	Peraturan BPKP No 8 Tahun 2021	Memadai	Efektif	ada
UC/C	Dokumen Perncaanaan Di OPD tidak sesuai perencanaan	4	5	20	Tinggi	KAK,SOP	Memadai	Efektif	ada
UC/C	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD belum memberikan informasi yang baik dan memadai anggaran	4	5	20	Tinggi	Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman Penilaian SAKIP, SOP	Memadai	Efektif	ada
UC/C	Permasalahan pada aplikasi	4	5	20	Tinggi	Koordinasi dengan pihak terkait	Memadai	Efektif	ada
UC/C	Pemenuhan Dokumen Keuangan belum disajikan dengan lengkap dan benar	4	5	20	Tinggi	KAK/SOP	Memadai	Efektif	ada
UC/C	Data yang tersaji belum bisa memberikan keyakinan yang	4	5	20	Tinggi	Menginstruksikan kepada Pejabat Struktural/ASN agar memberikan data yang valid	Memadai	Efektif	ada

	memadai								
UC/C	Laporan belum bisa memberikan keyakinan yang memadai	5	5	20	Tinggi	SOP	Memadai	Efektif	ada
UC/C	Penyajian Data Rekonsiliasi Aset belum memadai	5	5	20	Tinggi	Rekonsiliasi Aset secara berkala	Memadai	Efektif	ada
UC/C	Pencatatan di KIB belum dilaksanakan	4	4	20	Tinggi	Rekon secara berkala	Memadai	Efektif	ada
UC/C	Terlambatnya hasil pengadaan di terima	5	5	25	Tinggi	Koordinasi dengan pihak penyedia	Memadai	Efektif	ada
C	Salah Perencanaan	4	5	20	Tinggi	Perbaikan di Anggaran Perubahan	Memadai	Efektif	ada
UC/C	Peralatan dan perlengkapan Kantor OPD yang belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal	4	5	20	Tinggi	Pemeliharaan dan pemeriksaan terhadap instalasi penerangan dan pendingin ruangan kantor dilakukan secara kontinyu dan menyeluruh	Memadai	Efektif	ada
UC/C	Bahan Logistik kantor belum dapat memenuhi kebutuhan DP2KB terlambat	4	5	20	Tinggi	Penyaluran barang ke semua ruangan pimpinan dan staf sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.	Memadai	Efektif	ada
UC/C	Bahan Cetakan dan Penggandaan belum dapat memenuhi kebutuhan DP2KB	4	5	20	Tinggi	KAK/Penambahan Anggaran	Memadai	Efektif	ada
UC/C	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi tidak dapat menunjang operasional kantor DPPKB	4	5	20	Tinggi	Penugasan ASN yang kompeten untuk mengikuti Rapat-rapat koordinasi	Memadai	Efektif	ada
UC/C	Arsip Dinamis DPPKB belum dapat tertata dengan baik	4	5	20	Tinggi	KAK, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kearsipan dan membentuk tim arsip yang profesional	Memadai	Efektif	ada
UC/C	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan belum lengkap	4	5	20	Tinggi	Mengidentifikasi bahan bacaan dan Peraturan Perundang2an	Memadai	Efektif	ada
UC/C	Peralatan dan perlengkapan Kantor OPD yang belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal	4	5	20	Tinggi	KAK/Pemeliharaan secara berkala	Memadai	Efektif	ada
	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	4	5	20	Tinggi	Pembayaran Tagihan sesuai jadwal dan penggunaan	Memadai	Efektif	ada

	Listrik tidak dapat memberikan pelayanan operasional					fasilitas dengan baik dan efisien]			
	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor belum dapat memberikan kelancaran pelaksanaan tugas	4	5	20	Tinggi	Servis Peralatan secara berkala dan penggantian komponen yang sesuai standar	Memadai	Efektif	ada
	Perbaikan Kendaraan Dinas belum dapat memberikan kelancaran pelaksanaan tugas	4	5	20	Tinggi	Perawatan dan Penggantian komponen secara berkala serta pembayaran pajak tepat waktu	Memadai	Efektif	ada
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang belum dapat memberikan pelayanan yang baik	4	5	20	Tinggi	Perawatan dan penambahan sarana, serta penggantian komponen gedung secara berkala dan kontinyu	Memadai	Efektif	ada
	Regulasi pendukung program KKBPK masih terbatas	4	5	20	Tinggi	Kordinasi ke BKKBN Provinsi	Memadai	Efektif	ada
	Capaian sasaran program KKBPK KIE Budaya Lokal masih rendah	4	5	20	Tinggi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Memadai	Efektif	ada
	Jangkauan Promosi dan informasi Program KKBPK belum maksimal	4	5	20	Tinggi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Memadai	Efektif	ada
	jenis, Jangkauan dan sasaran media lokal masih terbatas	4	5	20	Tinggi	Menghimpun dan pengayaan jenis budaya lokal yang ada sebagai referensi	Memadai	Efektif	ada
	Utilitas Balai Penyuluhan KKBPK belum Optimal	4	5	20	Tinggi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Memadai	Efektif	ada
	Kinerja Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader PPKBD/Sub PPKBD belum optimal	4	5	20	Tinggi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Memadai	Efektif	ada
	Capaian program dan Kinerja Kader belum	4	5	20	Tinggi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan	Memadai	Efektif	ada

	optimal					terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana			
	Kinerja Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader PPKBD/Sub PPKBD belum optimal	4	5	20	Tinggi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Memadai	Efektif	ada
	Keterlambatan dan ketersediaan di Fasilitas Kesehatan belum mencukupi	4	5	20	Tinggi	Surat ke Balai untuk permintaan Barang Untuk Pengguna di Balai Menggunakan Permohonan	Memadai	Efektif	ada
	Capaian sasaran KB MKJP dalam SIGA rendah tidak sesuai dengan BAST Alokasi	4	5	20	Tinggi	Monev dan supervisi di Balai KKBPK	Memadai	Efektif	ada
	Sarana / Prasarana tidak sesuai dengan Spesifikasi yang distandarkan	4	5	20	Tinggi	Membuat Surat ke PPKom tentang spesifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Memadai	Efektif	ada
	Kehadiran dan partisipasi Ormas dan mitra kerja rendah	4	5	20	Tinggi	Membuat Surat don koordinasi ke Ormas dan Mitra Kerja	Memadai	Efektif	ada
	tingkat kehadiran dan partisipasi Ormas dan mitra kerja rendah	4	5	20	Tinggi	Membuat Surat don koordinasi ke Ormas dan Mitra Kerja	Memadai	Efektif	ada
	Pelayanan KB kepada Masyarakat belum maksimal	4	5	20	Tinggi	Meningkatkan Pelayanan dan KIE	Memadai	Efektif	ada
	Kinerja Pokja dan Poktan Kampung KB belum optimal	4	5	20	Tinggi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Memadai	Efektif	ada
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Tidak dapat menunjang kelancaran operasional	4	5	20	Tinggi	Mengadakan Sarana dan Prasarana sesuai analisa kebutuhan	Memadai	Efektif	ada
	Kemampuan Kader belum dapat meningkatkan Program ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	4	5	20	Tinggi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Memadai	Efektif	ada
	Tidak terakomodirnya semua kelompok kegiatan yang	4	5	20	Tinggi	Mendata Ulang POKTAN yang berhak mendapat biaya operasional	Memadai	Efektif	ada

	mendapatkan biaya operasional, sehingga banyak kelompok yang berjalan hanya seadanya dan tidak maksimal menjalankan program								
	Kemampuan Kader Kelompok Kegiatan belum dapat meningkatkan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4	5	20	Tinggi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Memadai	Efektif	ada
	Rendahnya jumlah remaja yang tergabung dalam kelompok PIK R dan Forum Generasi Berencana(GenRe)	4	5	20	Tinggi	Meningkatkan KIE	Memadai	Efektif	ada
	Kurangnya Koordinasi dan sinkronisasi program iBangga pada OPD sektoral dan stakeholder terkait	4	5	20	Tinggi	Melakukan Perjanjian Kerjasama dan Koordinasi yang lebih intensif	Memadai	Efektif	ada
	Mitra dan organisasi kemasyarakatan belum dapat meningkatkan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4	5	20	Tinggi	Melakukan Perjanjian Kerjasama dan Koordinasi yang lebih intensif kepada Stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA	Memadai	Efektif	ada
	Mitra Kerja belum dapat meningkatkan kemampuan nya dalam berusaha	4	5	20	Tinggi	Melakukan pembinaan ke UPPKA	Memadai	Efektif	ada
	Mitra dan organisasi kemasyarakatan belum dapat meningkatkan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4	5	20	Tinggi	Melakukan pembinaan ke UPPKA	Memadai	Efektif	ada
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Kependudukan Tidak dapat digunakan dalam kebijakan daerah	4	5	20	Tinggi	Surat Dinas Kepada PKB/PLKB tentang Pengelolaan data Kependudukan dan Keluarga	Memadai	Efektif	ada
	Profil kependudukan belum memberikan informasi yang optimal	4	5	20	Tinggi	Surat Dinas Kepada PKB/PLKB tentang Pengelolaan data Kependudukan dan Keluarga	Memadai	Efektif	ada

[illegible]

g. Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan

Gambar

Matriks Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan

Matriks Peta Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15 A
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2 A1	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

Keterangan: A = (Kode Risiko) sebelum penanganan

A1 = (Kode Risiko) setelah penanganan Risiko

h. Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan Eselon III sebagai berikut:

Tabel

Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat	Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/Dihindari/Dibagi)	Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko Setelah Pengendalian			
							K	D	Skor	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
c	Laporan yang tersaji tidak valid Dokumen pengukuran kinerja tidak sesuai disebabkan oleh Perangkat	20	Tinggi	2	Mitigasi	Pedoman Penyusunan	1	2	2	Rendah

	Daerah tidak mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian SAKIP					SAKIP,SOP Penyusunan SAKIP				
c	Data Evaluasi Kinerja Belum Valid dan dokumen Laporan Kinerja belum dapat dievaluasi oleh atasan langsung karena ASN dan Pejabat Struktural belum menyusun laporan kinerja	20	Tinggi	2	Mitigasi	Peraturan BPKP No 8 Tahun 2021	1	2	2	Rendah
c	Dokumen Perencanaan Di OPD tidak sesuai perencanaan	20	Tinggi	2	Mitigasi	KAK,SOP	1	2	2	Rendah
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD belum memberikan informasi yang baik dan memadai anggaran	20	Tinggi	2	Mitigasi	PedomanManajem en Risiko, Pedoman Penilaian SAKIP, SOP	1	2	2	Rendah
c	Permasalahan pada aplikasi	20	Tinggi	2	Mitigasi	Koordinasi dengan pihak terkait	1	2	2	Rendah
c	Pemenuhan Dokumen Keuangan belum disajikan dengan lengkap dan benar	20	Tinggi	2	Mitigasi	KAK/SOP	1	2	2	Rendah
c	Laporan yang tersaji tidak valid Dokumen pengukuran kinerja tidak sesuai disebabkan oleh Perangkat Daerah tidak mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian SAKIP	20	Tinggi	2	Mitigasi	Menginstruksikan kepada Pejabat Struktural/ASN agar memberikan data yang valid	1	2	2	Rendah
c	Data Evaluasi Kinerja Belum Valid dan dokumen Laporan Kinerja belum dapat dievaluasi oleh atasan langsung karena ASN dan Pejabat Struktural belum menyusun laporan kinerja	20	Tinggi	2	Mitigasi	Menginstruksikan kepada Pejabat Struktural/ASN agar memberikan data yang valid	1	2	2	Rendah
c	Data yang tersaji belum bisa memberikan keyakinan yang memadai	20	Tinggi	2	Mitigasi	Menginstruksikan kepada Pejabat Struktural/ASN agar memberikan data yang valid	1	2	2	Rendah
c	Laporan belum bisa memberikan keyakinan yang memadai	20	Tinggi	2	Mitigasi	Menginstruksikan kepada Pejabat Struktural/ASN agar memberikan data yang valid	1	2	2	Rendah
c	Penyajian Data Rekonsiliasi Aset belum memadai	20	Tinggi	2	Mitigasi	Rekonsiliasi Aset	1	2	2	Rendah
c	Pencatatan di KIB belum dilaksanakan	20	Tinggi	2	Mitigasi	Rekonsiliasi Aset	1	2	2	Rendah
c	Terlambatnya hasil	20	Tinggi	2	Mitigasi	Mengintruksikan	1	2	2	Rendah

	pengadaan di terima					agar proses pengadaan tepat waktu				
c	Salah Perencanaan	20	Tinggi	2	Mitigasi	Penyaluran barang ke semua ruangan pimpinan dan staf sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.	1	2	2	Rendah
c	Peralatan dan perlengkapan Kantor OPD yang belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal	20	Tinggi	2	Mitigasi	KAK/Penambahan Anggaran	1	2	2	Rendah
c	Bahan Logistik kantor belum dapat memenuhi kebutuhan DP2KB terlambat	20	Tinggi	2	Mitigasi	Penyaluran barang ke semua ruangan pimpinan dan staf sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.	1	2	2	Rendah
c	Bahan Cetakan dan Penggandaan belum dapat memenuhi kebutuhan DP2KB	20	Tinggi	2	Mitigasi	KAK, Penyediaan Saran dan Prasarana Kearsipan dan membentuk tim arsip yang profesional	1	2	2	Rendah
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi tidak dapat menunjang operasional kantor DPPKB	20	Tinggi	2	Mitigasi	Penugasan ASN yang kompeten untuk mengikuti Rapat-rapat koordinasi	1	2	2	Rendah
c	Arsip Dinamis DPPKB belum dapat tertata dengan baik	20	Tinggi	2	Mitigasi	KAK, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kearsipan dan membentuk tim arsip yang profesional	1	2	2	Rendah
c	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan belum lengkap	20	Tinggi	2	Mitigasi	Mengidentifikasi bahan bacaan dan Peraturan Perundang2an	1	2	2	Rendah
c	Peralatan dan perlengkapan Kantor OPD yang belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal	20	Tinggi	2	Mitigasi	Servis Peralatan secara berkala dan penggantian komponen yang sesuai standar	1	2	2	Rendah
c	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak dapat memberikan pelayanan operasional	20	Tinggi	2	Mitigasi	Pembayaran Tagihan sesuai jadwal dan penggunaan fasilitas dengan baik dan efisienj	1	2	2	Rendah
c	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor belum	20	Tinggi	2	Mitigasi	Servis Peralatan secara berkala	1	2	2	Rendah

	dapat memberikan kelancaran pelaksanaan tugas					dan penggantian komponen yang sesuai standar				
c	Perbaikan Kendaraan Dinas belum dapat memberikan kelancaran pelaksanaan tugas	20	Tinggi	2	Mitigasi	Perawatan dan Penggantian komponen secara berkala serta pembayaran pajak tepat waktu	1	2	2	Rendah
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang belum dapat memberikan pelayanan yang baik	20	Tinggi	2	Mitigasi	Perawatan dan penambahan sarana, serta penggantian komponen gedung secara berkala dan kontinyu	1	2	2	Rendah
	Regulasi pendukung program KKBPK masih terbatas	20	Tinggi	2	Mitigasi	Kordinasi ke BKKBN Provinsi	1	2	2	Rendah
	Capaian sasaran program KKBPK KIE Budaya Lokal masih rendah	20	Tinggi	2	Mitigasi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	1	2	2	Rendah
	Jangkauan Promosi dan informasi Program KKBPK belum maksimal	20	Tinggi	2	Mitigasi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	1	2	2	Rendah
	jenis, Jangkauan dan sasaran media lokal masih terbatas	20	Tinggi	2	Mitigasi	Menghimpun dan pengayaan jenis budaya lokal yang ada sebagai referensi	1	2	2	Rendah
	Utilitas Balai Penyuluhan KKBPK belum Optimal	20	Tinggi	2	Mitigasi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	1	2	2	Rendah
	Kinerja Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader PPKBD/Sub PPKBD belum optimal	20	Tinggi	2	Mitigasi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan	1	2	2	Rendah

						Keluarga Berencana				
	Capaian program dan Kinerja Kader belum optimal	20	Tinggi	2	Mitigasi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	1	2	2	Rendah
	Jangkauan Promosi dan informasi Program KKBPK belum maksimal	20	Tinggi	2	Mitigasi	Monev dan supervisi di Balai KKBPK	1	2	2	Rendah
	jenis, Jangkauan dan sasaran media lokal masih terbatas	20	Tinggi	2	Mitigasi	Menghimpun dan pengayaan jenis budaya lokal yang ada sebagai referensi	1	2	2	Rendah
	Utilitas Balai Penyuluhan KKBPK belum Optimal	20	Tinggi	2	Mitigasi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	1	2	2	Rendah
	Kinerja Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader PPKBD/Sub PPKBD belum optimal	20	Tinggi	2	Mitigasi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	1	2	2	Rendah
	Capaian program dan Kinerja Kader belum optimal	20	Tinggi	2	Mitigasi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	1	2	2	Rendah
	Kinerja Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader PPKBD/Sub PPKBD belum optimal	20	Tinggi	2	Mitigasi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	1	2	2	Rendah
	Keterlambatan dan ketersediaan di Fasilitas	20	Tinggi	2	Mitigasi	Surat ke Balai untuk permintaan	1	2	2	Rendah

	Kesehatan belum mencukupi					Barang Untuk Pengguna di Balai Menggunakan Permohonan				
	Capaian sasaran KB MKJP dalam New SIGA rendah tidak sesuai dengan BAST Alokasi	20	Tinggi	2	Mitigasi	Monev dan supervisi di Balai KKBPK	1	2	2	Rendah
	Sarana / Prasarana tidak sesuai dengan Spesifikasi yang distandarkan	20	Tinggi	2	Mitigasi	Membuat Surat ke PPKom tentang spesifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan	1	2	2	Rendah
	Kehadiran dan partisipasi Ormas dan mitra kerja rendah	20	Tinggi	2	Mitigasi	Membuat Surat don koordinasi ke Ormas dan Mitra Kerja	1	2	2	Rendah
	tingkat kehadiran dan partisipasi Ormas dan mitra kerja rendah	20	Tinggi	2	Mitigasi	Membuat Surat don koordinasi ke Ormas dan Mitra Kerja	1	2	2	Rendah
	Pelayanan KB kepada Masyarakat belum maksimal	20	Tinggi	2	Mitigasi	Meningkatkan Pelayanan dan KIE	1	2	2	Rendah
	Peran dan Partisipasi Ormas dan Mitra Kerja belum optimal	20	Tinggi	2	Mitigasi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	1	2	2	Rendah
	Kinerja Pokja dan Poktan Kampung KB belum optimal	20	Tinggi	2	Mitigasi	Surat Dinas Kepada PKB/PLKB tentang Pengelolaan data Kependudukan dan Keluarga	1	2	2	Rendah
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Tidak dapat menunjang kelancaran operasional	20	Tinggi	2	Mitigasi	Surat Dinas Kepada PKB/PLKB tentang Pengelolaan data Kependudukan dan Keluarga	1	2	2	Rendah
	Kemampuan Kader belum dapat meningkatkan Program ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	20	Tinggi	2	Mitigasi	Melakukan Pembinaan terhadap UPPKA	1	2	2	Rendah
	Tidak terakomodirnya semua kelompok kegiatan yang mendapatkan biaya operasional, sehingga banyak kelompok yang berjalan hanya seadanya dan tidak maksimal menjalankan program	20	Tinggi	2	Mitigasi	Mendata Ulang POKTAN yang berhak mendapat biaya operasional	1	2	2	Rendah

			Tinggi	2	Mitigasi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	1	2	2	Rendah
	Kemampuan Kader Kelompok Kegiatan belum dapat meningkatkan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	20								
	Rendahnya jumlah remaja yang tergabung dalam kelompok PIK R dan Forum Generasi Berencana(GenRe)	20	Tinggi	2	Mitigasi	Meningkatkan KIE	1	2	2	Rendah
	Kurangnya Koordinasi dan sinkronisasi program iBangga pada OPD sektoral dan stakeholder terkait	20	Tinggi	2	Mitigasi	Melakukan Perjanjian Kerjasama dan Koordinasi yang lebih intensif	1	2	2	Rendah
	Mitra dan organisasi kemasyarakatan belum dapat meningkatkan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	20	Tinggi	2	Mitigasi	Melakukan Perjanjian Kerjasama dan Koordinasi yang lebih intensif kepada Stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA	1	2	2	Rendah
	Mitra Kerja belum dapat meningkatkan kemampuan nya dalam berusaha	20	Tinggi	2	Mitigasi	Melakukan pembinaan ke UPPKA	1	2	2	Rendah
	Mitra dan organisasi kemasyarakatan belum dapat meningkatkan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	20	Tinggi	2	Mitigasi	Melakukan pembinaan ke UPPKA	1	2	2	Rendah
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Kependudukan Tidak dapat digunakan dalam kebijakan daerah	20	Tinggi	2	Mitigasi	Surat Dinas Kepada PKB/PLKB tentang Pengelolaan data Kependudukan dan Keluarga	1	2	2	Rendah
	Profil kependudukan belum memberikan informasi yang optimal	20	Tinggi	2	Mitigasi	Surat Dinas Kepada PKB/PLKB tentang Pengelolaan data Kependudukan dan Keluarga	1	2	2	Rendah
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga/SIGA dan Kegiatan BOKB tidak dapat dijalankan OPD	20	Tinggi	2	Mitigasi	Mendata Ulang POKTAN yang berhak mendapat biaya operasional	1	2	2	Rendah

[illegible]

- i. Perlakukan (*Respon*) dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko
- Respon dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Program dan Kegiatan eselon III sesuai dengan Tabel berikut:

Tabel
Rencana Tindak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan/sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
c	Dokumen pengukuran kinerja tidak sesuai disebabkan oleh pelaksana kegiatan tidak mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian SAKIP	Mitigasi	Melakukan evaluasi dan pendampingan penyusunan dokumen SAKIP Perangkat Daerah secara paralel	12 Bulan	Sekretaris. Sub Bag. Penyusunan Program dan Keuangan
c	Tidak tersedianya data dokumen perencanaan DPPKB, karena PPTK tidak menyampaikan data yang diperlukan kepada Tim Penyusun Dokumen Perencanaan	Mitigasi	Surat Edaran Kepala Dinas agar melengkapi data dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan.	12 Bulan	Sekretaris. Sub Bag. Penyusunan Program dan Keuangan
c	Dokumen Laporan Kinerja belum dapat dievaluasi oleh atasan langsung atau Tim Evaluator disebabkan oleh ASN dan Pejabat struktural belum menyusun laporan kinerja	Mitigasi	Surat Edaran Kepala Dinas agar melengkapi data dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan.	12 Bulan	Sekretaris. Sub Bag. Penyusunan Program dan Keuangan
c	laporan pengelolaan keuangan dan aset tidak sinkron disebabkan oleh Pencatatan pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan secara tidak akurat	Mitigasi	Membuatsurat instruksi ke bendahara dan PPK agar melakukan Pencatatan transaksi keuangan dan aset dan barang persediaan secara akurat dan melakukan sinkronisasi sebelum penyusunan laporan keuangan	Januari	Sekretaris. Sub Bag. Penyusunan Program dan Keuangan
uc	data progres kegiatan dari PPTK tidak di sampaikan ke sub bagian keuangan disebabkan oleh PPTK tidak membuat laporan progres bulanan	Mitigasi	Surat Edaran Kepala Dinas agar melengkapi data capaian kegiatan.	12 Bulan	Sekretaris. Sub Bag. Penyusunan Program dan Keuangan
c	Tidak sama nilai neraca barang/aset	Mitigasi	Pengurus Barang harus melakukan	12 Bulan	Sekretaris. Sub Bag. Penyusunan

	dan nilai neraca keuangan disebabkan oleh Selisih pada neraca keuangan dan neraca barang serta laporan aset yang tidak bisa diyakini		rekon secara berkala dengan bendahara dan melakukan pencatatan kondisi barang		Program dan Keuangan, Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Kurangnya SDM yang bisa menyelesaikan tugas secara baik dan benar	Mitigasi	Pelatihan pegawai sesuai dengan bidang tugas dan lembaga pelatihan yang sudah mempunyai legalitas yang baik.	12 Bulan	Sekretaris. Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Kesulitan dalam melakukan pengawasan disebabkan oleh keterampilan yang rendah	Mitigasi	Sosialisasi terhadap peraturan yang mengalami perubahan secara kontinyu dan berkala.	3 Bulan	Sekretaris. Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Sarana Kerja yang tidak baik dan menghambat pekerjaan disebabkan oleh komponen peralatan penerangan yang sudah tidak berfungsi.	Mitigasi	Pemeliharaan yang baik dan pengadaan alat penerangan yang berkualitas dan sesuai standar Nasional.	12 Bulan	Sekretaris. Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Terhambatnya aktivitas kerja bagi pegawai disebabkan oleh Peralatan dan perlengkapan kantor tidak tersedia	Mitigasi	Surat edaran kepada ASN untuk Penggunaan peralatan dan perlengkapan yang efektif dan efisien	3 Bulan	Sekretaris. Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Sinergitas dan komunikasi akan terhambat disebabkan oleh Komunikasi tidak berjalan	Mitigasi	Membuat instruksi untuk Menjadwalkan rapat secara rutin dan menugaskan pegawai sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing	6 Bulan	Sekretaris. Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Penataan arsip yang tidak sesuai peraturan dan petugas arsip yang tidak profesional disebabkan oleh arsip tidak terdokumentasi dengan baik	Mitigasi	Membuat surat instruksi kepada petugas yang terkait untuk Menyusun arsip dokumen sesuai dengan kodifikasi dan mengamankannya dari gangguan alam dan manusia.	12 Bulan	Sekretaris. Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	efektifitas dan efisiensi pekerjaan akan terhambat disebabkan oleh terlambat lelang	Mitigasi	Membuat surat instruksi untuk mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana lebih cepat	6 Bulan	Sekretaris. Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Komunikasi terganggu dan penggunaan peralatan kantor yang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya disebabkan oleh Fasilitas peralatan kantor tidak	Mitigasi	Surat Instruksi kepada ASN untuk penggunaan peralatan dengan prinsip hemat energi	12 Bulan	Sekretaris. Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

	bisa berfungsi				
c	Peralatan komputer yang tidak bisa digunakan dan ruangan yang terasa panas akan mengganggu kerja disebabkan oleh Fasilitas peralatan kantor tidak bisa berfungsi	Mitigasi	Surat Instruksi untuk Penggunaan peralatan dengan baik dan benar dan pemeliharaan rutin/berkala.	12 Bulan	Sekretaris. Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Terganggunya sarana mobilitas pimpinan disebabkan oleh kendaraan operasional tidak bisa beroperasi	Mitigasi	Surat Instruksi untuk melakukan pengecekan dan perawatan secara kontinyu peralatan tersebut	12 Bulan	Sekretaris. Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Kelayakan ruang kerja dan keamanan gedung tidak memadai disebabkan oleh Gedung tidak dapat difungsikan secara maksimal	Mitigasi	Membuat usulan penggantian dan perawatan gedung dan bangunan yang tidak layak	12 Bulan	Sekretaris. Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Regulasi pendukung program KKBPk masih terbatas	Mitigasi	Kordinasi ke BKKBN Provinsi	12 Bulan	Kabid Dalduk, Kabid KB
c	Capaian sasaran program KKBPk KIE Bidaya Lokal masih rendah	Mitigasi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	12 Bulan	Kabid KB
c	Jangkauan Promosi dan informasi Program KKBPk belum maksimal	Mitigasi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	12 Bulan	Kabid KB
c	jenias, Jangkauan dan sasaran media lokal masih terbatas	Mitigasi	Menghimpun dan pengayaan jenis budaya lokal yang ada sebagai referensi	12 Bulan	Kabid Dalduk/Kabid KB
C	Keterlibatan partisipasi petugas lapangan dalam Rakorcaam, Rakordes dan Minlok belum optimal	Mitigasi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	12 Bulan	Kabid KB/PPTK
c	Kinerja Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader PPKBD/Sub PPKBD belum optimal	Mitigasi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	12 Bulan	Kabid KB/PPTK
c	Belum optimalnya Penyediaan Sarana Pendukung Operasional	Mitigasi	Kordinasi ke BKKBN Provinsi	12 Bulan	Kabid KB/PPTK

	PKB/PLKB				
c	Capaian program dan Kinerja Kader belum optimal	Mitigasi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	12 Bulan	Kabid KB/PPTK
c	Keterlambatan dan ketersediaan alokon di Fasilitas Kesehatan belum mencukupi	Mitigasi	Surat ke Balai untuk permintaan Barang Untuk Pengguna di Balai Menggunakan Permohonan	12 Bulan	Kabid KB/PPTK
c	Pencatatan dan Pelaporan Akseptor dalam SIGA oleh Nakes/PLKB/PKB belum Optimal	Mitigasi	Monev dan supervisi di Balai KKBPK	12 Bulan	Kabid Dalduk/PPTK
c	tingkat kehadiran dan partisipasi Ormas dan mitra kerja rendah	Mitigasi	Membuat Surat ke PPKom tentang spesifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan	12 Bulan	Kabid Dalduk/PPTK
c	Peran dan Partisipasi Ormas dan Mitra Kerja belum optimal	Mitigasi	Membuat Surat don koordinasi ke Ormas dan Mitra Kerja	12 Bulan	Kabid Dalduk/PPTK
	Kinerja Pokja dan Poktan Kampung KB belum optimal	Mitigasi	Membuat Surat don koordinasi ke Ormas dan Mitra Kerja	12 Bulan	Kabid KB, Kabid KK
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Tidak dapat menunjang kelancaran operasional	Mitigasi	Meningkatkan Pelayanan dan KIE	12 Bulan	Kadis/PPTK
c	Kemampuan Kader belum dapat meningkatkan Program ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	Mitigasi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana	12 Bulan	Kabid KK
c	Tidak terakomodirnya semua kelompok kegiatan yang mendapatkan biaya operasional, sehingga banyak kelompok yang berjalan hanya seadanya dan tidak maksimal menjalankan program	Mitigasi	Mendata Ulang POKTAN yang berhak mendapat biaya operasional	12 Bulan	Kabid KK
c	Kemampuan Kader Kelompok Kegiatan belum dapat meningkatkan program ketahanan dan kesejahteraan	Mitigasi	Surat Dinas Kepada PKB/PLKB tentang Pengelolaan data dan Kependudukan dan Keluarga	12 Bulan	Kabid KK

	keluarga				
c	Rendahnya jumlah remaja yang tergabung dalam kelompok PIK R dan Forum Generasi Berencana(GenRe)	Mitigasi	Memperkuat KIE di Kampung KB dan melakukan Pembinaan terhadap Poktan yang sdh dibentuk	12 Bulan	Kabid KK
c	Kurangnya Koordinasi dan sinkronisasi program iBangga pada OPD sektoral dan stakeholder terkait	Mitigasi	Memperkuat koordinasi dan Membuat Perjanjian Kerjasama	12 Bulan	Kabid KK
c	Mitra dan organisasi kemasyarakatan belum dapat meningkatkan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Mitigasi	Memperkuat KIE di Kampung KB dan melakukan Pembinaan terhadap Poktan yang sdh dibentuk	12 Bulan	Kabid KK
c	Mitra Kerja belum dapat meningkatkan kemampuannya dalam berusaha	Mitigasi	Mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas PKB/PPKBD	12 Bulan	Kabid KK
c	Mitra dan organisasi kemasyarakatan belum dapat meningkatkan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Mitigasi	Mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas PKB/PPKBD	12 Bulan	Kabid KK
c	Penyediaan dan Pengelolaan Data Kependudukan Tidak dapat digunakan dalam kebijakan daerah	Mitigasi	Surat Dinas Kepada PKB/PLKB tentang Pengelolaan data Kependudukan dan Keluarga agar melakukan pendataan dan pelaporan secara optimal	12 Bulan	Kabid Dalduk
c	Profil kependudukan belum memberikan informasi yang optimal	Mitigasi	Memaksimalkan pendataan dan memperkuat kemampuan kader pendataan	12 Bulan	Kabid Dalduk
c	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga/SIGA dan Kegiatan BOKB tidak dapat dijalankan OPD	Mitigasi	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan serta Meningkatkan Pelayanan dan KIE	12 Bulan	Kabid Dalduk
c	PKB/PLKB dan Kader Pendata Belum Mampu dalam Melakukan pengorganisasian lini	Mitigasi	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan	12 Bulan	Kabid Dalduk

	lapangan		Keluarga Berencana		
c	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan belum optimal	Mitigasi	Surat Dinas Kepada PKB/PLKB tentang Pengelolaan data Kependudukan dan Keluarga agar melakukan pendataan dan pelaporan secara optimal	12 Bulan	Kabid Dalduk
c	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Mitigasi	Surat Dinas Kepada PKB/PLKB tentang Pengelolaan data Kependudukan dan Keluarga	12 Bulan	Kabid Dalduk
c	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia masih belum optimal	Mitigasi	Surat Dinas Kepada PKB/PLKB tentang Pengelolaan data Kependudukan dan Keluarga agar melakukan pendataan dan pelaporan secara optimal/SOP	12 Bulan	Kabid Dalduk
c	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Mitigasi	Surat Dinas Kepada PKB/PLKB tentang Pengelolaan data Kependudukan dan Keluarga agar melakukan pendataan dan pelaporan secara optimal/SOP	12 Bulan	Kabid Dalduk
c	Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan) belum dapat dijadikan alat pengambil keputusan	Mitigasi	Surat Dinas Kepada PKB/PLKB tentang Pengelolaan data Kependudukan dan Keluarga agar melakukan pendataan dan pelaporan secara optimal/SOP	12 Bulan	Kabid Dalduk

j. Pemantauan Risiko

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel
Pemantauan RTP Risiko Program dan Kegiatan eselon III

No	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(5)	(16)
	Membuat Kertas Kerja Pengendalian Penyajian Angka dan Dokumen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sekretaris	Kepala Dinas
	Menyusun Kertas Kerja Capaian Keuangan dan Fisik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sekretaris	Kepala Dinas
	Mengevaluasi Perencanaan Sekretariat dan Bidang	x	x	x							x	x	x	Sekretaris	Kepala Dinas
	Menyusun Kertas Kerja Capaian Progres masing - masing PPTK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S Sekretaris	Kepala Dinas
	melakukan evaluasi dan pendampingan penyusunan dokumen SAKIP Perangkat Daerah secara paralel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sekretariat	Kepala Dinas
	Surat Pengantar Penyampaian Daftar Gaji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sekretaris	Kepala Dinas
	Membuat surat usulan pendamping an Inspektorat dalam penyusunan dan pemenuhan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sekretaris	Kepala Dinas

[illegible]

	Surat edaran kepada ASN untuk Penggunaan peralatan dan perlengkapan yang efektif dan efisien serta membuat Daftar Permintaan Barang sesuai analisa kebutuhan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Kepala Dinas
	Surat Instruksi Pengurus Barang untuk melaksanakan penyaluran bahan cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan dan tepat waktu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Kepala Dinas
	Membuat instruksi untuk Menjadwalkan rapat secara rutin dan menugaskan pegawai sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Kepala Dinas
	Membuat surat instruksi kepada petugas yang terkait untuk Menyusun arsip dokumen sesuai dengan kodefikasi Serta mengaman kannya dari gangguan alam dan manusia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Kepala Dinas
	Membuat surat instruksi untuk mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana lebih cepat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Kepala Dinas
	Surat Instruksi kepada ASN untuk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sub Bag Umum,	Kepala Dinas

	penggunaan peralatan dengan prinsip hemat energi													Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	
	Mengadakan Pemeliharaan Rutin dan Berkala peralatan dengan baik.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sekretaris, Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Kepala Dinas
	Membuat usulan penggantian dan perawatan gedung dan bangunan yang tidak layak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sekretaris, Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Kepala Dinas
	penguatan Komunikasi dan Koordinasi dg stakeholder di tingkat Kabupaten	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kabid Dalduk	Kepala Dinas
	Menghimpun dan pengayaan jenis budaya lokal yang ada sebagai referensi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kabid KB	Kepala Dinas
	Komunikasi dan Koordinasi dg Kominfo untuk perluasan penyiaran/promosi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kabid Dalduk	Kepala Dinas
	sosialisasi SOP pelaksanaan KIE melalui budaya tradisional lokal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kabid KB	Kepala Dinas
	analisis dan Diseminasi data kepada petugas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kabid KB	Kepala Dinas

	lapangan														
	Monev dan supervisi di Balai KKBPK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kabid KB	Kepala Dinas
	Membuat Daftar Permintaan Alokon sesuai kebutuhan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kabid KB	Kepala Dinas
	Menginventarisir dan Membuat Surat Permintaan Mengeluarkan barang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kabid KB, Pengurus Barang	Kepala Dinas
	Membuat Daftar Permintaan Alokon	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kabid KB, Pengurus Barang	Kepala Dinas
	Membuat laporan Faskes dan Petugas KB	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kabid KB	Kepala Dinas
	Membuat MOU dengan pihak mitra pelayanan KB (MKJP 9RS)				x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kabid KB/Kabid Dalduk	Kepala Dinas
	Membuat Kartu Kendali Rekening Tagihan dan Pembayaran lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kabid KB	Kepala Dinas
	Menyusun materi promosi				x	x	x	x	x	x				Kabid, Pengawas, dan PPTK	Kepala Dinas

	Mebuat blangko stunting	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kabid / PPTK	Kepala Dinas
	Menginventarisir dan cecklist materi Banggakencana	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PPTK	Kepala Dinas
	Reviu dan cecklist materi Program KKBPK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PPTK	Kepala Dinas
	Reviu dan Ceklis materi				x	x	x	x	x	x				Kabid dan PPTK	Kepala Dinas
	penguatan koordinasi dg Faskes dan Petugas Lapangan	x	x	x										PPTK	Kepala Dinas
	Melakukan kontrol terhadap PPTK dan Chek list Tujuan dan Sasaran Program	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	KPA	Kepala Dinas
	Review Regulasi Kemungkinan Kebutuhan E-Katalog				x	x	x							Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala Dinas
	Review Narasumber dan Materinya				x	x	x	x	x	x				PPTK	Kepala Dinas
	mereviu, ceklis data sesuai dengan Tim pendamping Keluarga TPK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Kepala Dinas Keluarga

	Memberikan Arahan Kepada Tim Pendamping Keluarga agar saling berkoordinasi dilapangan							x	x	x				Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Kepala Dinas
	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok kegiatan melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana							x	x	x				PPTK	Kepala Dinas
	Review Indikator Perhitungan IPK							x	x	x				PPTK	Kepala Dinas
	Surat Dinas Kepada PKB/PLKB tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Kepala Dinas
	Penyusunan Laporan dengan Menggunakan Aplikasi (SIGA)				x	x	x	x	x	x				PPTK	Kepala Dinas
	Reviu dan validasi hasil pendataan PKB/PLKB dan kader Pendata				x	x	x	x	x	x				Kabid, Pengawas dan PPTK	Kepala Dinas
	Reviu dan validasi hasil pendataan PKB/PLKB				x	x	x	x	x	x				Kabid, Pengawas dan PPTK	Kepala Dinas
	Reviu tentang isi laporan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kabid, Pengawas dan	Kepala Dinas

														PPTK	
	Review blanko kependudukan				x	x	x	x	x	x				Kabid, Pengawas dan PPTK	Kepala Dinas
	Reviu Materi Rapat dan permasalahan rapat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kabid, Pengawas dan PPTK	Kepala Dinas
	Ceklis kurikulum pendidikan kependudukan				x	x	x	x	x	x				Kabid dan PPTK	Kepala Dinas
	Reviu dan Ceklis materi kurikulum				x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kabid dan PPTK	Kepala Dinas
	Reviu blanko data kependudukan				x	x	x	x	x	x				Kabid, dan PPTK	Kepala Dinas

Keterangan : (Warna Hijau rencana pelaksanaan)
(Warna Kuning Realisasi pelaksanaan)

3.3 Unit Pengelola Risiko Eselon IV

3.3.1 Kasubag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Nama Pejabat : **Hj. Bertha Melania, SE.,M.Si**

NIP 19730406 199803 2 009

k. Program dan kegiatan yang dikelola sesuai Tabel berikut:

Tabel
Sasaran Strategis, Indikator, Target dan Anggaran

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp.	Realisasi	
					Fisik	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP DPPKB	62,00			
1.1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Laporan	89.503.000	0 Dokumen 20%	20.700.000 23,13%
1.1.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	25.000.000	0 Laporan 0%	0 0%
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	34.503.000	0 Laporan 0%	0 0%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	30.000.000	1 Dokumen 50%	20.700.000 69%

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68 Orang	3.252.000	0 Orang 0%	0 0%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 Orang	3.252.000	0 Orang 0%	0 0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	42 Layanan	358.033.200	1 Paket 25%	29.595.000 8,27%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30 Paket	100.000.000	0 Paket 0%	0 0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang disediakan	3 Paket	60.000.000	1 Paket 25%	12.210.000 20,36%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	19.999.800	0 Paket 0%	0 0%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	1 Dokumen	9.630.000	0 Dokumen 0%	0 0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	30 Laporan	93.403.400	11 Laporan 36,67%	17.385.000 18,61%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip yang ditata	1 Dokumen	75.000.000	0 Dokumen 0%	0 0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diadakan	23 Unit	112.582.000	0 Unit 0%	0 0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan mesin	10 Unit	37.582.000	0 Unit 0%	0 0%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	75.000.000	0 Unit 0%	0 0%
	Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah waktu penyediaan	12 Bulan	1.759.981.0	12	386.692.377

	Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		91	Laporan 50%	21,97%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	414.888.200	6 Laporan 50%	107.553.361 25,92%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	75.000.000	0 Laporan 0%	0 0%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.270.092.891	6 Laporan 50%	279.139.016 21,98%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	95 Unit	529.924.378	4 Unit 4,76%	1.184.450 0,22%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	11,00	382.022.800	0 Unit 0%	0 0%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	128,00	97.901.578	4 Unit 4,76%	1.184.450 0,22%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1,00	50.000.000	0 Unit 0%	0 0%

I. Hasil Identifikasi Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel
Hasil identifikasi Risiko Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Kode Risiko		Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/
-----	-------------------------------	-------------	--	--------------	---------------	------	----------------------	-----------------

			Pernyataan Risiko					penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	C		Data Kinerja Sekretariat dan Bidang tidak Valid	Internal	C	Penilaian dari pihak eksternal belum bias memberikan penilaian yang baik atas laporan OPD	Kepala Dinas, Sekretaris
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	C		Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Internal	C	Nilai Ast tidak dapat diketahui, Data tidak valid	Kepala Dinas, Sekretaris
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	C	Pengadaan BMD tidak sesuai dengan analisa kebutuhan	Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Internal	C	Barang tidak terpakai, guna barang rendah	Kepala Dinas, Sekretaris
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	C	Tidak sama nilai neraca barang/aset dan nilai neraca keuangan	Asn yang ditugaskan tidak memiliki kapasitas dan kompetensi	Internal	C	Laporan Keuangan tidak bias disampaikan tepat waktu	Kepala Dinas, Sekretaris
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	C	Selisih pada neraca keuangan dan neraca barang serta laporan aset yang tidak bisa diyakini	Penyusunan Laporan Keuangan jadi terhambat	Internal	C	Laporan Keuangan tidak bias disampaikan tepat waktu	Kepala Dinas, Sekretaris
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kurangnya SDM yang bisa menyelesaikan tugas secara baik dan benar		Internal		Data Pegawai Tidak Valid	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	UC/C	Kurangnya SDM yang bisa menyelesaikan tugas secara baik dan benar	Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Internal	C	Kapasitas ASN tidak kompeten	Kepala Dinas, Sekretaris
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UC/C	Sarana Kerja yang tidak baik dan menghambat pekerjaan	Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Internal	C	Kenyamanan Bekerja tidak	Kepala Dinas, Sekretaris

			disebabkan oleh Komponen peralatan penerangan yang sudah tidak berfungsi.				didapat secara maksimal	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UC/C	Sarana Kerja yang tidak baik dan menghambat pekerjaan disebabkan oleh Komponen peralatan penerangan yang sudah tidak berfungsi.	Pemutusan pemakaian oleh pihak yang berkompeten	Internal	C	Pekerjaan tidak bisa dilaksanakan	Kepala Dinas, Sekretaris
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	UC/C	Bahan Logistik Kantor tidak mencukupi untuk kepentingan dinas	Peralatan dan Perlengkapan Kantor masih banyak yang rusak	Internal	C	Kebersihan kantor tidak terjaga	Kepala Dinas, Sekretaris
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	UC/C	Banyaknya permintaan barang cetakan yang tidak terakomodir	daftar gaji Non ASN terlambat di Verifikasi	Internal	C	Kegiatan jadi terhambat	Kepala Dinas, Sekretaris
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	UC/C	Bahan Bacaan tidak relevan	Kendaraan Dinas masih banyak yang rusak	Internal	C	Kurangnya pengetahuan pegawai tentang regulasi yang uodate	Kepala Dinas, Sekretaris
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	UC/C	ASN yang ditugaskan tidak kompeten	Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Internal	C	Laporan hasil perjalanan dan manfaat tidak maksimal	Kepala Dinas, Sekretaris
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	UC/C	Penataan arsip yang tidak sesuai peraturan dan petugas arsip yang tidak profesional disebabkan oleh arsip tidak terdokumentasi dengan baik	Klasifikasi dan kodefikasi arsip belum diterapkan	Internal	C	Kesulitan mencari arsip bila diperlukan	Kepala Dinas, Sekretaris
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	UC/C	efektifitas dan efisiensi pekerjaan akan terhambat disebabkan oleh terlambat lelang	Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Internal	C	Pekerjaan tidak bias dilaksanakan secara maksimal	Kepala Dinas, Sekretaris
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UC/C	Terhambatnya aktifitas kerja bagi pegawai disebabkan oleh Peralatan Mesin tidak tersedia	Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Internal	C	Laporan Keuangan tidak bias disampaikan tepat waktu	Kepala Dinas, Sekretaris
	Pengadaan Sarana dan Prasarana	UC/C	Kelayakan ruang kerja dan	Barang hasil Pengadaan	Internal	C	Kurangnya	Kepala Dinas,

	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		keamanan gedung tidak memadai disebabkan oleh Gedung tidak dapat difungsikan secara maksimal	Terlambat Diterima			rasa aman dan kenyamanan saat bekerja	Sekretaris
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UC/C	Kesulitan dalam melakukan pengawasan disebabkan oleh keterampilan yang rendah	Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Internal	C	Kurang maksimalnya pekerjaan yang dilakukan ASN	Kepala Dinas, Sekretaris
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UC/C	Sarana Kerja/Fasilitas kantor yang tidak baik dan menghambat pekerjaan disebabkan oleh Komponen peralatan penerangan, alat komunikasi dan sumber daya air yang tidak berfungsi.	Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Internal	C	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan bila terjadi pemutusan fasilitas secara sepihak	Kepala Dinas, Sekretaris
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UC/C	Terhambatnya aktifitas kerja bagi pegawai disebabkan oleh Peralatan dan perlengkapan kantor tidak tersedia	Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Internal	C	Pekerjaan tidak bias dilaksanakan secara maksimal	Kepala Dinas, Sekretaris
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UC/C	Kurangnya SDM yang bisa menyelesaikan tugas secara baik dan benar	Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Internal	C	Pekerjaan tidak bias dilaksanakan secara maksimal	Kepala Dinas, Sekretaris
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UC/C	Peralatan komputer yang tidak bisa digunakan dan ruangan yang terasa panas akan mengganggu kerja disebabkan oleh Fasilitas peralatan kantor tidak bisa berfungsi	Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Internal	C	Pekerjaan menjadi tidak maksimal	Kepala Dinas, Sekretaris
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	UC/C	Terganggunya sarana mobilitas pimpinan disebabkan oleh kendaraan operasional tidak bisa beroperasi	Barang hasil Pengadaan Terlambat Diterima	Internal	C	Mobilitas pimpinan jadi terhambat	Kepala Dinas, Sekretaris
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	UC/C	Terganggunya sarana mobilitas lapangan disebabkan oleh kendaraan	Kendaraan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya	Internal	C	Mobilitas pekerjaan lapangan	Kepala Dinas,

	Operasional atau Lapangan		operasional tidak bisa beroperasi				menjadi terhambat	Sekretaris
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UC/C	Kelayakan ruang kerja dan keamanan gedung tidak memadai disebabkan oleh Gedung tidak dapat difungsikan secara maksimal	Hasil Pemeliharaan Terlambat Diterima	Internal	C	Kurangnya rasa aman dan kenyamanan saat bekerja.	Kepala Dinas, Sekretaris

m. Hasil Analisis Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut

Tabel
Hasil Analisis Risiko

Kode Risiko.	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko				Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Perlakuan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian Tambahan	Analisis Risiko Setelah Pengendalian				Resiko Sisa
		K	D	Skor	Kategori/ Level risiko		Memadai/ Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif			K	D	Skor	Kategori/ Level risiko	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
C	Pengadaan BMD tidak sesuai dengan analisa kebutuhan	4	5	20	Tinggi	Surat kepada Bidang - bidang untuk dapat menyajikan data capaian kinerja	Memadai	Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada
UC/C	Tidak sama nilai neraca barang/aset dan nilai	4	5	20	Tinggi	SOP	Memadai	Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada

	neraca keuangan														
UC/ C	Selisih pada neraca keuangan dan neraca barang serta laporan aset yang tidak bisa diyakini	4	5	20	Tinggi	KAK	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada
UC/ C	Kurangnya SDM yang bisa menyelesaikan tugas secara baik dan benar	4	5	20	Tinggi	KAK	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada
UC/ C	Kurangnya SDM yang bisa menyelesaikan tugas secara baik dan benar	4	5	20	Tinggi	KAK	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada
UC/ C	Sarana Kerja yang tidak baik dan menghambat pekerjaan disebabkan oleh komponen peralatan penerangan yang sudah tidak berfungsi.	4	5	20	Tinggi	KAK	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada
UC/ C	Sarana Kerja yang tidak baik dan menghambat pekerjaan disebabkan oleh	4	5	20	Tinggi	KAK	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada

	Komponen peralatan penerangan yang sudah tidak berfungsi.														
UC/C	Bahan Logistik Kantor tidak mencukupi untuk kepentingan dinas	5	5	25	Tinggi	KAK	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada
UC/C	Banyaknya permintaan barang cetakan yang tidak terakomodir	5	5	25	Tinggi	KAK	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada
UC/C	Bahan Bacaan tidak relevan	4	4	16	Tinggi	KAK	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada
UC/C	ASN yang ditugaskan tidak kompeten	5	5	25	Tinggi	KAK	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada
C	Penataan arsip yang tidak sesuai peraturan dan petugas arsip yang tidak profesional disebabkan oleh arsip tidak terdokumentasi dengan baik	4	5	20	Tinggi	KAK	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada
UC/C	efektifitas dan efisiensi pekerjaan akan terhambat	4	5	20	Tinggi	KAK	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada

	disebabkan oleh terlambat lelang														
UC/ C	Terhambatnya aktifitas kerja bagi pegawai disebabkan oleh Peralatan Mesin tidak tersedia	4	5	20	Tinggi	KAK	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada
UC/ C	Kelayakan ruang kerja dan keamanan gedung tidak memadai disebabkan oleh Gedung tidak dapat difungsikan secara maksimal	4	5	20	Tinggi	KAK	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada
UC/ C	Kesulitan dalam melakukan pengawasan disebabkan oleh keterampilan yang rendah	4	5	20	Tinggi	KAK	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada
UC/ C	Sarana Kerja/Fasilitas kantor yang tidak baik dan menghambat pekerjaan disebabkan oleh Komponen peralatan penerangan, alat komunikasi	4	5	20	Tinggi	KAK	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada

	dan sumber daya air yang tidak berfungsi.														
UC/ C	Terhambatnya aktifitas kerja bagi pegawai disebabkan oleh Peralatan dan perlengkapan kantor tidak tersedia	4	5	20	Tinggi	KAK	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada
UC/ C	Kurangnya SDM yang bisa menyelesaikan tugas secara baik dan benar	4	5	20	Tinggi	KAK	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada
UC/ C	Peralatan komputer yang tidak bisa digunakan dan ruangan yang terasa panas akan mengganggu kerja disebabkan oleh Fasilitas peralatan kantor tidak bisa berfungsi	4	5	20	Tinggi	KAK	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	4	5	16	Rendah	ada

n. Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan

Matriks Peta Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20 A
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2 A1	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

Keterangan: A = (Kode Risiko) sebelum penanganan

A1 = (Kode Risiko) setelah penanganan Risiko

Gambar: Matriks Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan

o. Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan Eselon IV sebagai berikut:

Tabel

Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah belum memberikan penilaian yang baik	20	Tinggi	4
c	Penyusunan dokumen perencanaan daerah di OPD tidak dapat di laksanakan dengan baik	20	Tinggi	4
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD belum memberikan informasi yang baik dan memadai	20	Tinggi	4
uc	RKA SKPD penyusunanya belum dapat mengakomodir kebijakan daerah	20	Tinggi	4
c	Gaji dan Tunjangan ASN tidak dapat	20	Tinggi	4

	memberikan kesejahteraan kepada ASN			
c	Penataanusahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD belum memberikan kehandalan dalam kelengkapannya.	20	Tinggi	4
c	Laporan Capaian Realisasi Kegiatan SKPD Tidak Maksimal	20	Tinggi	4
c	Laporan tidak bisa memberikan keyakinan yang memadai	20	Tinggi	4
c	Laporan tidak bisa memberikan keyakinan yang memadai	20	Tinggi	4
c	Rekonsiasi Barang Milik Daerah Hasil pengadaan ke laporan keuangan SKPD Penyajiannya belum wajar	20	Tinggi	4
c	Barang Milik Daerah Yang tidak dilakukan Panatausahaan dengan baik	20	Tinggi	4
c	Kapasitas ASN masih rendah dalam penerapan IT dan Penjabaran Kebijakan	20	Tinggi	4
c	Peralatan dan perlengkapan Kantor OPD yang belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal	20	Tinggi	4
c	Bahan Logistik kantor belum dapat memenuhi kebutuhan DP2KB	20	Tinggi	4
c	Bahan Cetakan dan Penggandaan belum dapat memenuhi kebutuhan DP2KB	20	Tinggi	4
c	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi tidak dapat menunjang operasional kantor DPPKB	20	Tinggi	4
c	Arsip Dinamis DPPKB belum dapat tertata dengan baik	20	Tinggi	4
c	Peralatan dan perlengkapan Kantor OPD yang belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal	20	Tinggi	4
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang belum dapat memberikan pelayanan yang baik	20	Tinggi	4
	Kendaraan Dinas Kantor belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal	20	Tinggi	4
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang belum dapat memberikan pelayanan yang baik	20	Tinggi	4
c	Peralatan dan perlengkapan Kantor OPD yang belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal	20	Tinggi	4
c	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	20	Tinggi	4

	Listrik tidak dapat memberikan pelayanan operasional			
c	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor belum dapat memberikan kelancaran pelaksanaan tugas	20	Tinggi	4
c	Gaji Non ASN tidak dapat memberikan kesejahteraan kepada Non ASN	20	Tinggi	4
c	Perbaikan Kendaraan Dinas belum dapat memberikan kelancaran pelaksanaan tugas	20	Tinggi	4
c	Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan belum dapat memberikan kelancaran pelaksanaan tugas	20	Tinggi	4
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang belum dapat memberikan pelayanan yang baik	20	Tinggi	4
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang belum dapat memberikan pelayanan yang baik	20	Tinggi	4

p. Perlakuan (Respon) dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko

Respon dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Program dan Kegiatan eselon III sesuai dengan Tabel berikut:

Tabel

Rencana Tindak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan/sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Kertas Kerja Pengendalian Penyajian Angka dan Dokumen	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Capaian Keuangan dan Fisik	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Perencanaan Sekretariat dan Bidang	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

c	Rendah	Mitigasi	Reviu Capaian Progres masing - masing PPTK	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
uc	Rendah	Mitigasi	Reviu atas Draf RKA	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Surat Pengantar Penyampaian Daftar Gaji	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Akun Belanja	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Akun Belanja	3 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Akun Belanja	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Akun Belanja	3 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	reviu berita acara penerimaan dan penyerahan barang	6 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Barang- barang yang akan diserahkan	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Materi dan Jadwal Pelaksanaan	6 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Permintaan Barang	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Permintaan Barang	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum,

					Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Permintaan Barang	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Permohonan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu penyimpanan arsip dinamis	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Permintaan Barang	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Kontrak	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Permintaan Barang	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Tagihan	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Barang-barang yang rusak	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Surat Pengantar ke Bank	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Kendaraan Dinas yang rusak	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Kerusakan	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

c	Rendah	Mitigasi	Reviu Kontrak	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
c	Rendah	Mitigasi	Reviu Kontrak	12 Bulan	Kepala Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

q. Pemantauan Risiko

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel

Pemantauan RTP Risiko Program dan Kegiatan eselon IV

No	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penang gung jawab Risiko
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(5)	(16)
	Membuat Kertas Kerja Pengendalian Penyajian Angka dan Dokumen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Kepala Dinas
	Menyusun Kertas Kerja Capaian Keuangan dan Fisik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Tim Monev
	Mengevaluasi Perencanaan Sekretariat dan Bidang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	PPTK, Sekretaris
	Menyusun Kertas Kerja Capaian Progres masing - masing PPTK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Semua PPTK/ Sekretaris/Bida ng/OPD

	Reviu atas Draft RKA						x	x	x	x				Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Semua PPTK/ Sekretaris/Bidang/OPD
	Surat Pengantar Penyampaian Daftar Gaji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Pembuat Daftar Gaji / Sekretaris
	Reviu Akun Belanja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Semua PPTK/Kepala Dinas/PPTK terkait
	Reviu Akun Belanja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Pemda/ DPPKB
	Reviu Akun Belanja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Pemda/ DPPKB
	Reviu Akun Belanja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Pemda/ DPPKB
	Rekonsiliasi berita acara penerimaan dan penyerahan barang					x	x	x	x					Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Petugas Entri KIB/Kepala Dinas
	Menyusun Daftar Barang-barang yang akan diserahkan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Pengguna Barang

	Menyusun Materi dan Jadwal Pelaksanaan	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	PPTK, Sekretaris
	Membuat Daftar Permintaan Barang			x	x	x				x	x	x	x	Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Pengurus barang/Sekretari s
	Membuat Daftar Permintaan Barang									x	x	x	x	Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Pengurus barang/Sekretari s
	Membuat Daftar Permintaan Barang									x	x	x	x	Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Pengurus barang/Sekretari s
	Membuat Surat Permohonan Rapat Koordinasi dan Konsultasi													Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	ASN/Sekretaris
	Membuat Daftar Permintaan Barang													Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Pengurus barang/Sekretari s
	Reviu Kontrak													Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	PPTK/KPA
	Membuat Daftar Permintaan Barang		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Pengurus barang/Sekretari s

	Membuat Kartu Kendali Tagihan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Pihak pemutus/Sekretaris
	Meinventarisir Barang-barang yang rusak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Pengurus Barang/Kasubb ag Umum
	Surat Pengantar ke Bank	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	PPTK/Sekretaris
	Meninventarisir Kendaraan Dinas yang rusak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Pengurus Barang/Kasubb ag Umum
	Menginventarisir Kerusakan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Pengurus Barang/Kasubb ag Umum

Keterangan : (Warna Hijau rencana pelaksanaan)
(Warna Kuning Realisasi pelaksanaan)

BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pengelolaan Risiko Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan II Tahun 2025 disampaikan Kepada Bupati Kutai Kartanegara sebagai bahan masukan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

DAFIP HARYANTO, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip: 197009241990031001

BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pengelolaan Risiko Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan II Tahun 2025 disampaikan Kepada Bupati Kutai Kartanegara sebagai bahan masukan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



DAFIP HARYANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip: 197009241990031001